



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

LAKIP

Tahun 2024



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KAB. POLEWALI MANDAR**



Kata Pengantar

10 Uji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya sehingga tugas –tugas Pemerintahan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar dapat diselesaikan.

LAKIP ini disusun sebagai perwujudan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan merupakan salah satu upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar yang telah dilakukan selama tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi.

Sejalan dengan hasil tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 yang memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian tujuan dan sasarannya telah ditetapkan dalam Rencana KerjaTahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

Hasil pencapaian kinerja menyelenggarakan Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar tidak terlepas dari kerjasama semua pihak baik dalam perumusan program kegiatan, maupun dalam inplementasi dan pelaksanaan pengawasannya.

Kami sadari dalam penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan dan belum sesuai dengan harapan, olehnya itu kami sangat mengharapkan kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan LAKIP ini sekaligus masukan dalam penyusunan LAKIP berikutnya.



Polewali, 9 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ARIFIN HALIM, S.Sos.MSi

Pangkat : Pembina Utama Muda

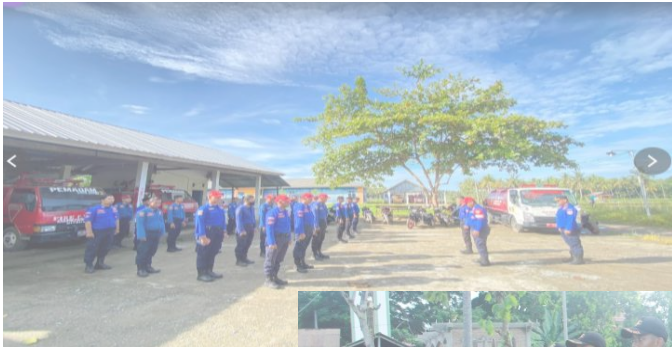
NIP : 19670319 200012 1 003

Daftar isi

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.2.. Dasar Hukum.....	3
1.1.3. Maksud dan Tujuan Pelaporan	5
1.2 Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.2.1 Kondisi Organisasi	5
1.2.1.1 Kondisi Kelembagaan	5
1.2.1.2 Kondisi Kepegawaian.....	8
1.2.1.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang.....	12
1.2.2 Sistematika Penyajian.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	22
2.1 Rencana Strategis.....	22
2.1.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja	23
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	24
2.1.2.1 Tujuan	24
2.1.2.2 Sasaran	25
2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2024	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	55
3.1. Akuntabilitas Kinerja	55
3.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	56
3.1.1.1. Capaian Sasaran 1 Optimalnya situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	56

3.1.1.1.1 Indikator Kinerja 1 Sasaran Program 1 : Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	59
3.1.1.1.2 Indikator Kinerja 2 Sasaran Program 1 : Persentase Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman yang ditindaklanjuti	76
3.1.1.1.3 Indikator Kinerja 3 Sasaran Program 1 : Persentase Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi Dasar dan Tehnis.....	93
3.1.1.1.4 Indikator Kinerja 4 Sasaran Program 1 : Persentase kecamatan yang memilki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai.....	98
3.1.1.2. Capaian Sasaran 2 Meningkatnya Kesipasiagaan dan Penanganan Kebakaran	101
3.1.1.3. Capaian Sasaran 3 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	109
3.1.1.3.1 Predikat SAKIP Perangkat Daerah	109
3.1.1.3.2 Persentase Tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	110
3.1.1.3.3 Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	111
3.2. Akuntabilitas Keuangan	118

BAB IV PENUTUP.....	122
4.1 Simpulan.....	122
4.2 Saran.....	123



Daftar tabel

Tabel 1.1	Berdasarkan Formasi Jabatan.....	8
Tabel 1.2	Daftar Pejabat Struktural dan Fungsional Satpol PP Tahun 2024	9
Tabel 1.3	Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	9
Tabel 1.4	Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Satpol PP dan Damkar	10
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja menurut jenjang DiklatpinTahun 2024	11
Tabel1.6	Jumlah Satpol PP dan Damkar yang telah mengikuti Bimtek dan Diklat Khusus	11
Tabel 1.7	Banyaknya Pegawai berdasarkan Gender	12
Tabel1.8	Sarana dan Prasarana	12
Tabel 1.9	Kartu Inventaris Barang	15
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka menengah pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	26
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kinerjaserta Target Kinerja	38
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Tahun 2024	43
Tabel 3.1	Optimalnya situasi dan Kondisi Ketentraman dan ketertiban umum Masyarakat	57
Tabel 3.2	Data Pelanggaran Perda Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024..	61
Tabel 3.3	Data Kasus Ketertiban , Ketentraman Dan Keindahan Yang Ditindaklanjuti Tahun 2024	77
Tabel 3.4	Jumlah Aksi Unjuk Rasa aksi damai dan Kerusuhan Massa Tahun 2024..	86
Tabel 3.5	Data Unjuk Rasa Kab.Polewali Mandar 5 Tahun	91

Tabel 3.6	Meningkatnya Kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	93
Tabel 3.7	Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi Standar Kompetensi	96
Tabel 3.8	Meningkatnya Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat	99
Tabel 3.9	Daftar Tenaga Satinmas yang telah dilatih dikabupaten	100
Tabel 3.10	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran ...	101
Tabel 3.11	Cakupan Pelayanan bencana kebakaran wilayah kabupaten.....	102
Tabel 3.12	Tingkat Waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK...	102
Tabel 3.13	Daftar Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	105
Tabel 3.14	Program Kegiatan UPTD Pemadam kebakaran Tahun 2024	108
Tabel 3.15	Capaian Indikator Program 3 Peredikat SAKIP Perangkat daerah	109
Tabel 3.16	Capaian Indikator Program 3 Perencanaan dan pelaporan Tahun 2023 dan 2024.....	110
Tabel 3.17	Capaian Indikator Program 3 Persentase Tertib Pengelolaan keuangan dana aset perangkat daerah	111
Tabel 3.18	capaian Indikator Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2023 dan Tahun 2024	111
Tabel 3.19	Capaian Indikator Program 3 Indeks Kepuasan pengguna pelayanan public perangkat daerah	112
Tabel 3.20	Program Kegiatan Pelayanan Publik Tahun 2024	113
Tabel 3.21	Capaian Indikator Pelayanan Publik Tahun 2023 dan 2024	116
Tabel 3.22	Belanja Aparatur Tahun 2024.....	
Tabel 3.23	Laporan Keuangan Satpol PP Tahun 2024.....	

Daftar grafik

Grafik 1 Sistematika Penyajian Laporan akuntabilitas Kinerja Tahun 2024....	20
Grafik 2 Persentase kasus pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	63
Grafik 3.Persentase kasus pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti	80
Grafik 4 Rasio pendistribusian Satpol PP terhadap jumlah Kecamatan	98
Grafik 5 Persentase Kebakaran Perbulan Tahun 2024.....	106

Lampiran

Lampiran I : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Lampiran III : Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Lampiran IV : Realisasi Anggaran Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. LATAR BELAKANG

Latar belakang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar dikarenakan adanya keinginan yang kuat untuk mewujudkan Good Governance, berlandaskan pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perwujudan Good Governance ini diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam tiga pilar Tata Pemerintahan yang baik yaitu Akuntabilitas, Partisipasi, dan Transparansi. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi asas Kepastian Hukum, asas Tertib Penyelenggaraan Negara, asas Kepentingan Umum, asas Keterbukaan, asas Proporsionalitas, asas Profesionalitas dan asas Akuntabilitas. Asas Akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengantisipasi perkembangan masyarakat yang dinamis, selaras dengan tuntutan era globalisasi dan Otonomi Daerah, maka kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat di daerah. Karena itu tugas Kepala Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Umum praktis bertambah berat. Dalam kaitan ini keberadaan Satuan



Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar dalam jajaran perangkat Pemerintah Daerah mempunyai arti yang strategis dalam membantu Kepala Daerah di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

Sejalan dengan dasar pola dan struktur organisasi yang baru, struktur organisasi dan nomenklatur baru dengan peraturan daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan **Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten polewali mandar** termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dengan menyusun dasar / pedoman pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung program Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, yang diaplikasikan melalui program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang harus dipertanggungjawabkan sebagai tolak ukur capaian kinerja yang merupakan penjabaran rencana strategis sebagai bentuk pelaksanaan keuangan berdasarkan **Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit pelaksana teknis daerah pada Dinas dan badan dilingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar** Fungsi Pemadam Kebakaran bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi UPTD Pemadam Kebakaran.

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam pasal 255 ayat (1) **Undang-Undang 23 Tahun 2014 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja** dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dan semakin meningkatnya estalasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, dibuat pula Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian indikator kinerja sasaran sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan juga sebagai pelaksanaan dari Inpres 7 tahun 1999 yang mengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas. Selain itu LAKIP ini juga merupakan kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar secara menyeluruh. Sebagai wujud implementasi



akuntabilitas, maka dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, disampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024.

.Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretariat Daerah Nomor B – 01/000.8.6.3/Org/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Penyusunan LAKIP Perangkat daerah Tahun 2024 .

LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Walaupun Inpres 7 tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Lembaga Instansi Pemerintah untuk menyusun laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar secara menyeluruh.

1.1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat :

1. Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja



4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
5. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang pedoman pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Polewali Mandar.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
14. Peraturan Bupati Polewali Mandar 23 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019
15. Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi , tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar .
16. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit pelaksana teknis daerah pada Dinas dan badan dilingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar



1.1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PELAPORAN

Adapun Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja adalah meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Sedangkan Tujuannya adalah sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.2.1. KONDISI ORGANISASI

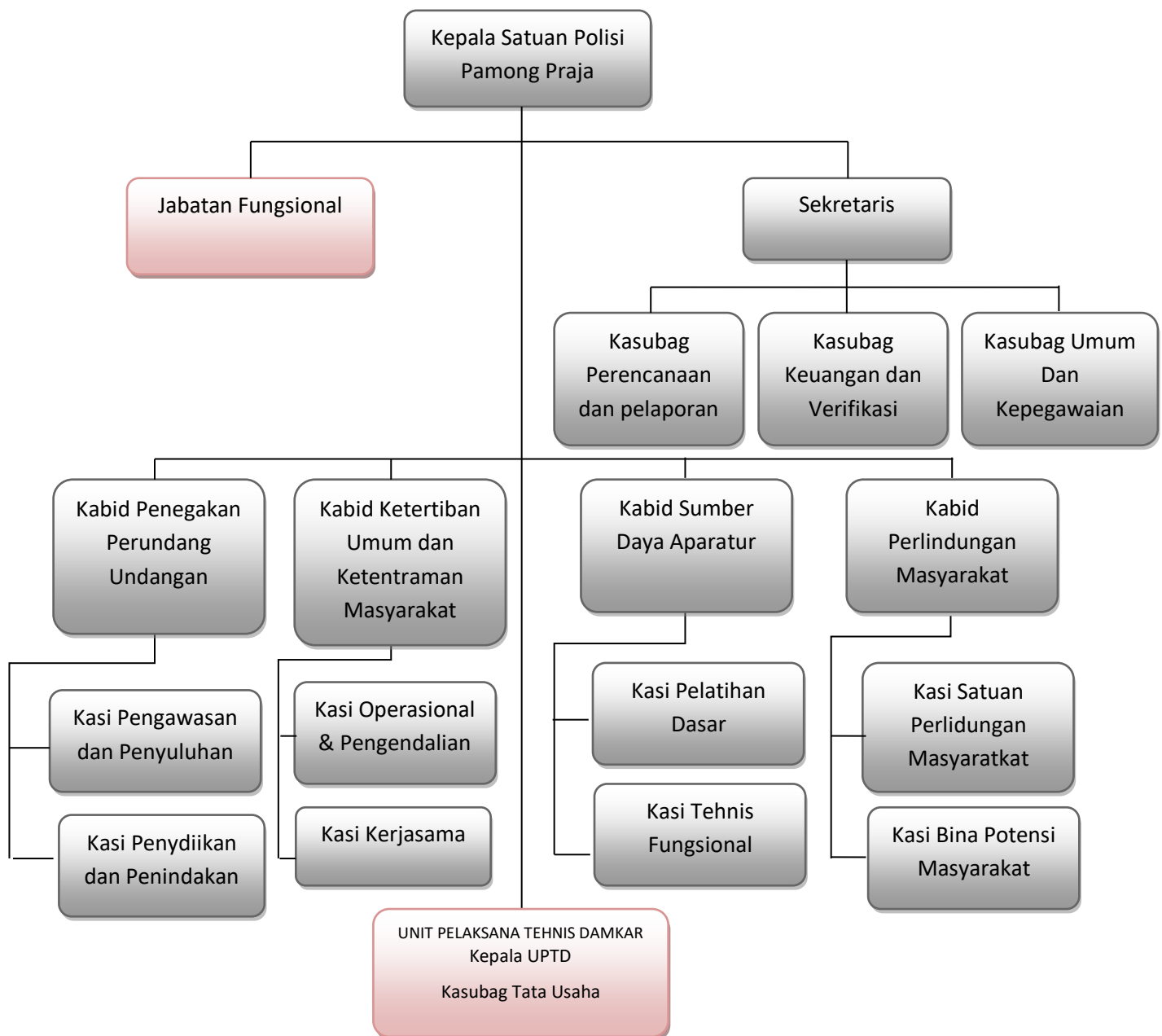
1.2.1.1 Kondisi Kelembagaan

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi yang tertentu. Satuan Polisi Pamong Praja, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

- Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 12 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar , sebagai berikut :





Sebagaimana diatur Permendagri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Satpol PP terbagi atas :

1. Pol PP Keterampilan
 - Pol PP Pelaksana Pemula
 - Pol PP Pelaksana
 - Pol PP Pelaksana Lanjutan
 - Pol PP Penyelia
2. Pol PP Keahlian
 - Pol PP Pertama
 - Pol PP Muda
 - Pol PP Madya

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar No. 44 Tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi , tugas pokok dan fungsi serta tata kerja, maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

➤ **Tugas pokok**

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah .

➤ **Fungsi**

- Perumusan kebijakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat ;
- Pelaksanaan kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan Bupati, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum bersama Satuan Kerja Perangkat daerah lainnya.

Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama penyidik Pegawai Negeri Sipil SKPD terkait dengan kordinasi pihak Kepolisian sesuai dengan ketentuan Perundang undangan.

1.2.1.2 Kondisi Kepegawaian

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan perangkat kerja yang mempunyai kompetensi pada bidang tugasnya masing-masing. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari PNS berdasarkan Jabatan , Tingkat Pendidikan, Pangkat, Golongan dan berdasarkan jenjang Diklatpim.

Tabel 1.1

Berdasarkan Formasi jabatan:

No	Tingkat Jabatan	Eselon	Ket
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	II b	
2.	Sekretaris	III a	
3.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	IIIb	
4.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	IIIb	
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur	IIIb	
6.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	IIIb	
7.	Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan	IVa	
8.	Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Verifikasi	IVa	
9.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	IVa	
10.	Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan	IVa	
11.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	IVa	
12.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	IVa	
13.	Kepala Seksi Kerjasama	IVa	
14.	Kepala Seksi Pelatihan Dasar	IVa	



15.	Kepala Seksi Satuan Linmas	IVa	
16.	Kepala Seksi Teknis Fungsional	IVa	
17.	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	IVa	
18.	Kepala UPTD Pemadam Kebakaran	IVa	
19.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pemadam Kebakaran	IVb	

Tabel 1.2

Daftar Pejabat Struktural dan Fungsional Satpol PP Tahun 2024

NO	Nama Pegawai	NIP	Tipe Jabatan (JFU/JFT/Struktural)	Nama Jabatan	Eselon	Golongan	Pendidikan
1	ARIFIN HALIM, S.Sos, M.Si	196703192000121003	Struktural	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	II.a	IV/c	S2
2	Drs. MASDIH DJINI	196904011991031018	Struktural	Plt.Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	III.a	IV/b	S1
3	RAHMAT, S. S.os	197112312002121027	Struktural	Kabid Trantibum dan Ketentraman Masyarakat	III.b	III/d	SMA
4	Drs. MASDIH DJINI	196904011991031018	Struktural	Kabid Perlindungan Masyarakat	III.b	IV/a	S1
5	MOHAMMAD NUR SAFAAT, S.Sos	197504122002121009	Struktural	Kabid Sumber Daya Aparatur	III.b	III/d	S1
6	ANDI PUTRA IIP KUNENG SIPAKKARI	198702082006041003	Struktural	Kabid Penegakan Perundang undangan Daerah	III.b	III/c	S2
7	ABD. MAJID SYACHRIR, S.Sos	198310072005021002	Struktural	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	IV.a	III/d	S1
8	SLAMET, S.Sos	197805012002121005	Struktural	Kasubag Keuangan dan Verifikasi	IV.a	III/c	S1
9	HARNIATY,SE	198001032009012005	Struktural	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV.a	III/d	S1
10	I S N A E N I, S. Sos	197004122002121009	Struktural	Kasi Kerjasama	IV.a	III/d	S1
11	MUHAMMAD IRFAN S.IP	198207202006041008	Struktural	Kasi Operasi Pengendalian	IV.a	III/d	S1
12	ANDI BANGSAWAN, S.HI	198206102009011009	Struktural	Kasi Teknis Fungsional	IV.a	III/b	S1
13	NUR ALAMSYAH, S.Sos	197710182002121009	Struktural	Kasi Pelatihan Dasar	IV.a	III/d	S1
14	Y U S U F, SH	197905162002121008	Struktural	Kasi Penyelidikan dan Penindakan	IV.a	III/d	S1
15	MUH.AMIN.S.IP	198303032009011025	Struktural	Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan	IV.a	III/c	S1
16	AHMAD RASADA, S.Sos	198101312002121005	Struktural	Kasi Bina Potensi Masyarakat	IV.a	III/d	S1
17	H A S M A N, S.Sos	197301102006041020	Struktural	Kasi Satlinmas	IV.a	III/c	S1
18	I M R A N, S.IP	198207182009011007	Struktural	Kepala UPTD Pemadam Kebakaran	IV.a	III/c	S2
19	LENNI DAMAYANTI,S.Sos	197709292002122005	Struktural	Kasubag Tata Usha Damkar	IV.b	III/d	S1
20	DEDY MACHMUD, S.Sos	197903112002121009	Fungsional	Pol PP Ahli Pertama		III/b	S1
21	SYAHARUDDIN	197702122005021004	Fungsional	Pol PP Ahli Pertama		III/b	S1
22	DJANIAR, S.Sos	196809212002122004	Fungsional	Pol PP Ahli Muda		III/d	S1
23	F A D L I	197112122009011008	Fungsional	Pol PP Ahli Pertama		III/b	S1
24	ABD. RAHMAN, S.IP	197212312009011024	Fungsional	Pol PP Ahli Pertama		III/b	S1
25	AMIRULLAH, S.HI	197412252009011004	Fungsional	Pol PP Ahli Pertama		III/b	S1
27	M. SOFIAN IDRUS, A.Md	197312202006041019	Fungsional	Pol PP Mahir		III/a	D3
28	MUHAMMAD RAIS.Z	198002242008011005	Fungsional	Pol PP Mahir		III/a	S1
29	HASANUDDIN	198410142010011001	Fungsional	Pol PP Terampil		II/c	SMA
30	JAMALUDDIN	197106152006041030	Fungsional	Pol PP Terampil		II/d	SMA
31	MUHAJIR	197103222009011003	Fungsional	Pol PP Terampil		II/d	SMA

Tabel 1.3

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Status Pegawai				Jumlah
		PNS/PPPK		Non PNS		
		Satpol PP	Damkar	Satpol PP	Damkar	
1	Pasca Sarjana (S2)	4	1	1	-	6
2	Sarjana (S1)	60	5	24	1	90
3	Diploma III	1	-	2	-	3
4	Diploma II	-	-	-	1	1



5	Diploma I	-	-	-	-	-
6	SLTA	31	6	94	80	211
7	SLTP	-	1	-	1	2
8	SD	-	-	-	-	-
J U M L A H		96	13	121	83	313

Tabel 1.4

Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang Satpol PP dan Damkar

No.	Pangkat / Gol. Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama / IV e	-	-	-	
2	Pembina Utama Madya/IV d	-	-	-	
3	Pembina Utama Muda / IV c	.1	-	1	
4	Pembina Tk.I / IV b	-	-	-	
5	Pembina / IV a	1	-	1	
6	Penata Tk. I / III d	9	3	12	
7	Penata / III c	39	-	39	
8	Penata Muda Tk.I / III b	10	-	10	
9	Penata Muda / III a	16	-	16	
10	Pengatur Tk.I / II d	15	-	15	
11	Pengatur / II c	4	-	4	
12	Pengatur Muda / II b	-	-	-	
13	Pengatur Muda / II a	1	-	1	
14	Juru Tk. I / I d	-	-	-	
15	Juru / I c	-	-	-	
16	Juru Muda Tk. I / I b	-	-	-	
17	Juru Muda / I a	-	-	-	
18	Pengatur Muda / Gol V	10	-	10	
19	Pegawai Tidak Tetap (PTT) Satpol PP	104	17	121	
20	Pegawai Tidak Tetap (PTT) Damkar	80	3	83	
J U M L A H		290	23	313	



Tabel 1.5

Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja menurut Jenjang Diklatpim, Tahun 2024.

Satuan Unit	DIKLATPIM				Ket
	Belum Pernah	Pernah Diikuti			
		IV	III	II	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran	16	1	1	-	-
	2	-	-	-	
Jumlah	18	1	1	-	-

Tabel 1.6

**Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
yang telah mengikuti Bimtek dan Diklat Khusus.**

Satuan Unit	PNS/PPPK		PTT		Ket
	Telah Mengikuti	Belum Mengikuti	Telah Mengikuti	Belum Mengikuti	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SATPOL PP					
Diklat Dasar Satpol PP	40	55	-	-	
Diklat Pembentukan PPNS	5	90	-	-	
Diklat Bela Negara	4	91	-	-	
Bimtek Peningkatan Kapasitas Satpol PP	95	-	110	11	
PEMADAM KEBAKARAN					
Bimtek Pemahaman Dasar Damkar	2	1	83	-	
Pendidikan Pemadam Kebakaran Kelas D	-	14	-	83	



Pendidikan Pemadam Kebakaran Kelas C	-	14	-	83	
Pendidikan Pemadam Kebakaran Kelas B	-	14	-	83	
Pendidikan Pemadam Kebakaran Kelas A	-	14	-	83	

Tabel 1.7

Banyaknya PNS dan PTT berdasarkan Gender.

Satuan Unit	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki-Laki		Perempuan		
	PNS/PPPK	PTT	PNS/PPK	PTT	
(1)	(2)		(3)		(4)
Satuan Polisi Pamong Praja	93	104	3	17	217
Pemadam Kebakaran	12	80	1	3	96
Jumlah	105	184	4	20	313

1.2.1.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang

Kondisi sarana dan prasarana penunjang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.8

Sarana dan Prasarana

No.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5
1	Mobil Operasional Satpol PP	3 Unit	3	
2	Tabung Gas	1	1	
3	Tangga Tali	1	1	
4	Pataka	1	1	
5	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1		1
6	Tenda (Tenda Kompi)	2		1



7	Tameng	59	30	29
8	Baju Dalmas	29		29
9	Lemari Buku Arsip Untuk	10	8	2
10	Meja Komputer	1	1	
11	Dispenser	2	1	1
12	Tanda Heli Ved	1		1
13	Lemari Es	1	1	
14	A.C. Split	5	3	2
15	Mesin Ketik Manual Portable	1		1
16	Televisi	3	2	1
17	P.C Unit	5	2	3
18	Meja Rapat	2		2
19	Unit Power Supply	1		1
20	Kursi Kerja	44	31	13
21	All Band Receiver	1		1
22	Meja Kerja	20	20	
23	Handy Cam	2		2
24	Handy Talky (HT)	12	2	10
25	Printer	8	4	4
26	Sepeda Motor	7	7	
27	Tripot Handy Cam	1	1	
28	Wireless	1		1
29	Megaphone	1	1	
30	Lighting Equipment	1	1	
31	Mobil	2	2	
32	Laptop	14	10	4
33	Hard Disk	1		1
34	Mesin Absensi	1		1
35	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2		2
36	Camera Video	1	1	
37	Layar Film/Projector	1	1	
38	Rak Piring Alumunium	1	1	
39	Gordyin/Kray	1	1	
40	Kompore Gas (Alat Dapur)	2	2	
41	Alat Pemadam Kebakaran	1	1	
42	Treng Air/Tandon Air	1	1	
43	Pompa Kebakaran/Portable	1	1	
44	Nozle Tester	16	16	
45	Selang Pemadam Kebakaran	12	8	4
46	Kamera Digital	1		1
47	Perkakas Perbengkelan	2	2	
48	Modem Wireless	1		1



49	Pompa Air	3	3	
50	Tempat Tidur Vealbek (Damkar)	30	4	26
51	Sambungan Selang Pemadam Kebakaran	6	6	
52	Kursi Tamu	1	1	
53	Alat Alat Farmasi Berupa Alat Kesehatan Multi Check)	1		1
54	Alat-Alat Farmasi Berupa Alat Kesehatan P3K	1		1
55	Mobil Tangki Air	5	5	
56	Compresor Gigi	1	1	
57	Crusible Penyaring	5	5	
58	Pesawat Telephone	1	1	
59	Tali Penolong Korban	9		9
60	Helm Dalmas	20		20
61	Snapling	9		9
62	Pentung	22		22
63	Papan Pengumuman	1	1	
64	Palu Sidang	1	1	
65	Kain Hijau	1	1	
66	Keyboard	1		1
67	Mouse	5	2	3
68	Loker 26 orang anggota pemadam	24		24
69	(Alat Farmasi Berupa Alat Kesehatan Tensi Meter Stoskop)	2		2



Tabel 1.9

KARTU INVENTARIS BARANG

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	13.2.05.002.005.009	Tabung Gas	000382	- / -		Besi	1982						Pembelian	600,00	Tabung Gas
1	13.2.01.003.012.017	Tangga Tali Pataka	000001	-			2006						Pembelian	390,00	Tali Induk Bendera
2	13.2.05.002.006.033	Target Drone (Simulasi Pesawat	000222	- / -			2006						Pembelian	1.170,00	Petaka Tali Pembantu
3	13.2.09.002.001.011	Sasaran Tembak Udara)	000494	-		Tali	2006						Pembelian	500,00	Tenda Kompi
4	13.2.15.003.002.005	Tenda	000219 s/d 000219	- / -		Kain	2006						Pembelian	17.940,00	
1	13.2.09.004.002.028	Tameng Tameng	000252 s/d 000279	- / -		Piber Piber	2007						Pembelian	17.584,00	Tameng Tameng Baju
2	13.2.09.004.002.028	alat dalam alat dakhura lainnya (dst)	000369 s/d 000370	- / -			2007						Pembelian	1.296,00	Daimas
3	13.2.09.004.002.036		000280 s/d 000309	- / -			2007						Pembelian	37.680,00	
1	13.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000454 s/d 000455	- / -		Besi	2008						Pembelian	3.160,00	Lemari Arsip
1	13.2.05.001.004.002	Lemari Kayu Lemari Sorok Meja	000169	- / -		Plastik Kayu	2009						Pembelian	2.500,00	Lemari
2	13.2.05.001.004.026	Komputer Alat Dapur lainnya	000457	-		Plastik	2009						Pembelian	700,00	Lemari Box File Meja
3	13.2.05.002.001.039	alat-alat sandi lainnya (dst)	000219	- / - Miyako / Miyako			2009						Pembelian	1.750,00	Komputer Dispenser
4	13.2.05.002.005.026		000482	- / -			2009						Pembelian	350,00	Tanda Heli Ved
5	13.2.06.002.007.020		000373	- / -			2009						Pembelian	750,00	
1	13.2.05.002.004.001	Lemari Es	000375	Panasinac /		Besi	2010						Pembelian	1.500,00	Kulkas AC
2	13.2.05.002.004.004	A.C. Split	000376 s/d 000377	Panasinac		Serbuk Kayu	2010						Pembelian	8.000,00	Lemari Arsip
3	13.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000459	Panasinac / Panasinac			2010						Pembelian	1.000,00	
1	13.2.02.001.001.003	Station Wagon	000001	/ Toyota	4009		2011				DC9031C		PEMBELIAN	292.863,50	Dikuasai pihak lain -
2	13.2.05.001.001.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	000161	Olinetti / Olinetti			2011						Pembelian	2.000,00	Wonomulyo Mesin
3	13.2.05.002.006.002	Televisi	000385	Sharp / Sharp			2011						Pembelian	2.000,00	Ketik
4	13.2.10.001.002.001	P.C Unit	000484	Core i3 / Core i3			2011						Pembelian	5.000,00	Televisi Komputer PC
1	13.2.05.002.001.008	Meja Rapat	000175 s/d 000176	-Meja Sidang /			2012						Pembelian	1.200,00	Meja Rapat AC
2	13.2.05.002.004.004	A.C. Split	000378 s/d 000379	-Meja Sidang			2012						Pembelian	10.000,00	Power supply
3	13.2.05.002.006.018	Unit Power Supply	000001	Air Conditioning			2012						Pembelian	1800,00	Kabel RG
4	13.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain Kursi	000413	Unit / Air			2012						Pembelian	450,00	Kursi Kerja Pejabat
5	13.2.05.003.003.006	Kursi Kerja Eselon IV	000454	Conditioning Unit			2012						Pembelian	1.700,00	Eselon IV
6	13.2.05.003.003.009	Kursi Kerja Pejabat lainnya Ali Band	000200 s/d 000206	RT-VC RG			2012						Pembelian	2.800,00	Kursi Kerja Ali band
7	13.2.06.003.023.021	Receiver	000001	- / -	40 Ampere	Besi kawat	2012						Pembelian	4.780,00	Meja Kerja
8	13.2.08.001.056.081	Meja Kerja	000485 s/d 000491	-Kursi Kerja /	20 m	besi kayu	2012						Pembelian	5.250,00	
				-Kursi Kerja Alinco											
				Meja Kerja / Meja Kerja											
1	13.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu Kursi Putar Handy	000429 s/d 000438	-			2013						Pembelian	7.900,00	Meja Kerja Kursi Putar
2	13.2.05.002.001.032	Cam	000189	- / -			2013						Pembelian	750,00	Handy Cam
3	13.2.05.002.006.048	Kursi Kerja Pejabat Eselon III Kursi	000390	-			2013						Pembelian	4.875,00	Kursi Kerja Eselon 3
4	13.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Kursi Kerja	000449	-			2013						Pembelian	3.000,00	Kursi Kerja Eselon 4
5	13.2.05.003.003.006	Pejabat lainnya Handy Talky (HT)	000450 s/d 000453	-			2013						Pembelian	8.000,00	Kursi Kerja Handy
6	13.2.05.003.003.009	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000439 s/d 000448	futura			2013						Pembelian	5.500,00	Talky Printer
7	13.2.06.002.001.006		000471	-			2013						Pembelian	2.875,00	
8	13.2.10.002.003.003		000426	-			2013						Pembelian	800,00	
1	13.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	000133	-		Besi piber piber	2014		MFFC 25SFEK0034 91	W4FML2D004449	DC 6834 CY	L-02142532	Pembelian	23.000,00	Motor Trail Double
2	13.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	000465	Monstrac / MTR			2014						Pembelian	23.000,00	Pencatatan Motor Trail
3	13.2.03.002.003.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	000135	200X			2014						Pembelian	500,00	Monstrac
4	13.2.05.002.006.012	Wireless Megaphone Lighting	000386	-			2014						Pembelian	5.000,00	Triptol Handy Cam
5	13.2.05.002.006.013	Equipment	000387	-			2014						Pembelian	1.000,00	Wireless Microphone
6	13.2.08.008.015.005		000497	-			2014						Pembelian	500,00	Megaphone TOA
				-											Vidio Lighting Handy Cam

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Polewali Mander Tahun 2024

1	1.3.2.02.001.001.002	Jeep	000001	Toyota - Hilux	2500	Besi	2015	731616000-KDR-00	MROFR22G7EO788	2KD-S390315	DC 8010 C		Pembelian	390.900,00	Plat DC 45 C Motor	
2	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor Kursi Biasa	000134	-			2015	0007020					Pembelian	17.948,60	Kursi kerja fatura	
3	1.3.2.05.002.001.033	Meja Kerja Pejabat Eselon IV Lap Top	000207 s/d 000216	futura / futura			2015						Pembelian	5.000,00	Meja kerja 1 biro	
4	1.3.2.05.003.001.006		000427 s/d 000428	-			2015						Pembelian	2.000,00	Laptop asus slim 14	
5	1.3.2.10.001.002.002		000420	-			2015						Pembelian	5.000,00		
1	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor Meja Kerja Kayu	000135	Honda Scoopy	108 CC	Besi	2016		MH1JFW114GK427	JFW1E1435739	DC 6981 CW	M-10563348R	Pembelian	18.130,00	Sepeda Motor	
2	1.3.2.05.002.001.002	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000439 s/d 000440	Active	1 Biro	Serbuk Kayu	2016		400				Pembelian	3.400,00	Meja Kerja	
3	1.3.2.05.003.003.005	P.C Unit Lap Top Lap Top Hard Disk	000450 s/d 000451	Front Line Lenovo	14"	Besi/Gab us	2016						Pembelian	5.000,00	Kursi Kerja Eselon	
4	1.3.2.10.001.002.001	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000414	Asus / Core i5	14"	Fiber Fiber	2016						Pembelian	7.000,00	Komputer PC Laptop	
5	1.3.2.10.001.002.002		000422	Asus / Core i3	14"	Fiber Fiber	2016						Pembelian	8.000,00	Laptop	
6	1.3.2.10.001.002.002		000423	TOSHIBA / 1 TB		Fiber	2016						Pembelian	7.000,00	Harddisk Eksternal	
7	1.3.2.10.002.001.012		000001	Canon / iP2770			2016						Pembelian	1.000,00		
8	1.3.2.10.002.003.003		000001 s/d 000002				2016						Pembelian	2.000,00		
1	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	000466	HONDA /	124 CC	BENSIN	2017		MH1JFU110HK879	JFU1E1882051	DC 6874 CU	M-04040247R	Pembelian	19.430,00	Sepeda Motor Matic	
2	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000004	E1F02N11M2 A/T.			2017		060				Pembelian	3.250,00	Vario 125	
3	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000005	MATIC epson Canon / iP2770			2017						Pembelian	750,00	Printer Epson Printer canon	
1	1.3.2.08.004.004.008	recorder display lainnya (dst)	000497	Epson / L-360		Fiber Fiber	2018						Pembelian	2.700,00	Ruang Sekertariat	
2	1.3.2.08.004.004.008	recorder display lainnya (dst)	000498	Epson / L-405 asus		fiber	2018						Pembelian	3.300,00	Ruang Sekertariat	
3	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000424	ASUS		Fiber	2018						Pembelian	9.500,00	dikuasai Oleh Pengurus Barang Darwis,S.IP	
4	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000425		14 ind 14 Ind		2018						Pembelian	9.500,00	dikuasai oleh Pembuat SPM /SPM Jaswat Yusuf, S.IP	
1	1.3.2.02.001.003.002	Pick Up	000001	Toyota /	2494 cc	Besi fiber	2019		MROES8B4K0064	2KD-D001604	DC 8089 CY	O-06950871R	Pembelian	268.551,00	Kendaraan operasional	
2	1.3.2.05.001.005.012	Mesin Absensi	000166	Hilux Pick	1 PK/ Puth	Fiber Fiber	2019		978				Pembelian	4.250,00	di Depan Ruang Kasat	
3	1.3.2.05.002.004.005	Portable Air Conditioner (Alat	000001 s/d 000002	UP 2,5 DSI	14 Ind	Serbuk Kayu	2019						Pembelian	9.790,00	PoliPP	
4	1.3.2.05.002.006.021	Pendingin)	000001	Solution /	14 Ind	Fiber Fiber	2019						Pembelian	8.024,00	Ruang Sekertariat	
5	1.3.2.05.003.001.005	Camera Video	000001	X302-5		Fiber	2019						Pembelian	2.000,00	Digunakan Oleh	
6	1.3.2.06.001.002.105	Meja Kerja Pejabat Eselon III Layar	000001	Panasonic		Fiber	2019						Pembelian	7.000,00	Hasanuddin S.IP	
7	1.3.2.06.002.001.006	Film/Projector	000478 s/d 000481	Canon /	1300 D		2019						Pembelian	6.000,00	Humas Satpol PP	
8	1.3.2.10.001.002.002	Handy Talky (HT) Lap Top	000426	Handy Talky			2019						Pembelian	5.500,00	Dipakai oleh Kasi	
9	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000427	activ / 1 Biro			2019						Pembelian	5.500,00	Penyidikan Yusuf, S.Sos (Warna Merah Maron) Digunakan Oleh Nur Syafaat S.Sos Kasi Teknis Fungsional (warna Silver)	
1	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	000170	-	0 Cm x 170 C	Kayu	2020						Pembelian	2.227,90	Lemari Arsip	
2	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	000001 s/d 000002	Futura		Besi	2020						Pembelian	717,00	Satpol PP	
3	1.3.2.05.002.005.015	Rak Piring Aluminium	000001	-		Besi/	2020						Pembelian	500,00	Kursi Staf	
						aluminu									Rak Piring	
						m										
4	1.3.2.05.002.006.048	Handy Cam	000392	Sony / MC		Fiber	2020						Pembelian	15.750,00	di Gunaan	
															Kantor untuk	
															Keperluan	
															Dokumentasi	
5	1.3.2.05.002.006.059	Gordyjn/Kray	000001	-	30 Meter	Kain	2020						Pembelian	6.000,00	Ruangan	
															Sekertariat dan	
6	1.3.2.05.003.003.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	000001	Frontline /		Besi dab	2020						Pembelian	3.300,00	Kepela SatpolPP	
				Hitam		Spon									diGunakan Oleh	
															terpela satuan	
															Polisi Pamong	
															Praja Drs. Aco	
															Djalaluddin AM,	
7	1.3.2.06.002.001.006	Handy Talky (HT)	000482 s/d 000485	Alinco		Fiber	2020						Pembelian	10.000,00	Msi	
															di Gudang	



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Polewali Mandar Tahun 2024

8	1.3.2.06.002.001.006	Handy Talky (HT)	000486 s/d 000489		Rt RTG	RTG ic	Fiber dan aluminium m	2020						Pembelian	16.000,00	Pesawat Radio	
																dan antena	
9	1.3.2.08.001.013.081	TV Monitor	000001		LG / Layer Datar	55 Inci	Fiber	2020					Pembelian	8.000,00	Di Ruangan Sekertariat		
10	1.3.2.08.001.013.081	TV Monitor	000002		LG / Layer Datar	32 Inci	Fiber	2020					Pembelian	3.500,00	Digunakan di Ruangan Kepala Kantor SatpolPP		
11	1.3.2.08.001.041.192	Personal Computer	000001		Lenovo / 330-20 AST	16 Inci	Fiber	2020					Pembelian	6.823,80	Digunakan oleh Warsman S.Sos		
12	1.3.2.08.001.041.192	Personal Computer	000002		Lenovo / 330-20 AST	16 Inci	Fiber	2020					Pembelian	6.823,80	Digunakan Oleh Imran S.IP		
13	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000428		Asus / Core3	14 Inci	Fiber	2020					Pembelian	6.471,00	Di Gunakan oleh Muliady S.Sos		
14	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000429		Asus / Core3	14 Inci	Fiber	2020					Pembelian	6.471,00	Digunakan Oleh Harniaty SE		
15	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000430		Asus / Core3	14 Inci	Fiber	2020					Pembelian	6.471,00	digunakan Oleh arif		
16	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000427		Epson / LS190	Hitam	Fiber	2020					Pembelian	4.217,20	Jihad Pratama alam		
17	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000428		Epson / L 120	Hitam	Fiber	2020					Pembelian	1.660,40	Digunakan di ruangan Sekertariat satpolPP diGunakan Di Ruangan Perundang Undangan Meja Imran S.IP		
1	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	000467		Vario / 150		Besi	2021		MH1KCS111FK061 286	51E-1061593	DC 6870 CW	Pembelian	25.890,00	digunakan oleh MAJID		
2	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	000190 s/d 000191		cc		kayu	2021					Pembelian	1.648,00	SYAHRIR,S.Sos /		
3	1.3.2.05.002.005.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	000382		-		besi	2021					Pembelian	332,00	kasubag Perencanaan		
4	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000001 s/d 000004		rinnai futura		besi dan	2021					Pembelian	2.200,00	dan pelaporan		
5	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000460		-		kain (busa)	2021					Pembelian	1.800,00	digunakan oleh		
6	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000461		-		kayu	2021					Pembelian	3.000,00	kasubag. keuangan dan		
7	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000462		- LG	18 inchi 14 inchi/ abu- a	Besi kayu	2021					Pembelian	1.800,00	verifikasi slamet S.Sos		
8	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit Lap Top	000485		lenovo / abu		fiber fiber	2021					Pembelian	5.463,70	digunakan oleh lusi		
9	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000431		- abu		fiber	2021					Pembelian	11.456,70	fungsional moch. Nur		
10	1.3.2.10.001.002.002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000432		lenovo		fiber	2021					Pembelian	11.456,70	Safaat, S.Sos		
11	1.3.2.10.002.003.003		000429 s/d 000430		canon 1010			2021					Pembelian	3.320,80			
1	1.3.2.05.002.007.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	000001		/ Honda			2010						PEMBELIAN	1.000,00	UPTD Pemadam	
1	1.3.2.05.002.005.011	Treng Air/Tandon Air Pompa	000001		/ -			2011						PEMBELIAN PEMBELIAN	21.000,00	Pengadaan Gorden	
2	1.3.2.05.002.007.002	Kebakaran/Portable	000001		/ -			2011							15.000,00	Mesin Pompa	
															Alcom/UPTD Pemadam		
1	1.3.2.08.001.010.014	Nozle Tester	000001		/ -			2012						PEMBELIAN	1.500,00	Nozzle (Monitor	
2	1.3.2.08.001.010.014	Nozle Tester	000002		/ -			2012						PEMBELIAN	4.000,00	Penembak Air)/UPTD	
															Pemadam Nozzle		
															(Cabang 2)/UPTD		
															Pemadam		
1	1.3.2.05.002.007.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	000012 s/d 000013		-			2013						PEMBELIAN	20.000,00	Selang Pemadam	
2	1.3.2.06.001.002.164	Alat Studio Video Lainnya	000001		- / -			2013						PEMBELIAN	3.000,00	Kebakaran/UPTD	
															Pemadam Kamera		
															Digital		
1	1.3.2.05.002.005.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	000059		Rinnai /			2015						PEMBELIAN	500,00	Kompor	
2	1.3.2.08.001.042.002	Perkakas Modem	000001 s/d 000002		Rinnai			2015						PEMBELIAN PEMBELIAN	3.000,00	Gas/Minyak/UPT D	
3	1.3.2.10.002.004.004		000001		-			2015							500,00	Pemadam Perkakas	
					Bolt / Bolt											Perbengkelan	
																Modem Wireless/UPTD	
																Pemadam	



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Polewali Mandar Tahun 2024

1	1.3.2.01.003.005.010	Pompa Air Sepeda Motor Lemari Kaca	000001 s/d 000006	-	-	BESI	2016				besi			Pembelian	96.000,00	APBD
2	1.3.2.02.001.004.001	Meja Kerja Kayu	000003	-	YAMAHA /	BESI	2016							Pembelian	25.973,50	APBD dimutasi ke
3	1.3.2.05.001.004.027	Meja Kerja Pejabat Eselon IV Kursi	000001	-	VISION	KACA/AL	2016							Pembelian	3.500,00	Damkar
4	1.3.2.05.002.001.002	Kerja Pejabat Eselon IV Kursi Kerja	000001 s/d 000004	-	-	MINIUM	2016							Pembelian	5.600,00	APBD APBD APBD APBD
5	1.3.2.05.003.001.006	Pejabat lainnya Note Book	000001	-	-	KAYU KAYU	2016							Pembelian	2.500,00	APBD
6	1.3.2.05.003.003.006	Note Book	000001	-	-	KAYU BESI	2016							Pembelian	1.400,00	Dikuasai Oleh UPTD
7	1.3.2.05.003.003.009	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001 s/d 000004	-	-	FIBER	2016							Pembelian	2.000,00	Damkar
8	1.3.2.10.001.002.003	Air Conditioning (AC)	000001	-	-	FIBER FIBER	2016								7.000,00	A.n Rudini Abbas
9	1.3.2.10.001.002.003		000002	-	HP / AC 004	FIBER	2016								7.000,00	Dikuasai Oleh UPTD
10	1.3.2.10.002.003.003		000076	-	CI 3		2016								3.500,00	Damkar
11	1.3.2.15.004.005.006		000008	-	ASUS / A		2016								8.500,00	APBD APBD
				-	445 LA											
				-	EPSON / L											
				-	120											
				-	PANASONIC											
				-	/ 2 PK											
1	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	000001 s/d 000030	-	-	Besi Kain	2017							Pembelian	21.000,00	Kebutuhan
															Kantor UPTD	
															DAMKAR	
															(Tempat Tidur	
															Vealbek)	
															Moublier Lainnya	
2	1.3.2.05.002.007.016	Alat Pembantu Kebakaran	000001	-	30 M 2,5"		2017							Pembelian	8.500,00	Kebutuhan
															Kantor UPTD	
															Damkar	
3	1.3.2.05.002.007.016	Alat Pembantu Kebakaran	000002	-	30 Meter 2,5"		2017							Pembelian	8.500,00	Kebutuhan
															Kantor UPTD	
															Damkar	
4	1.3.2.05.002.007.016	Alat Pembantu Kebakaran	000003 s/d 000004	-	30 Meter 1,5"		2017							Pembelian	16.000,00	Kebutuhan
															Kantor UPTD	
															Damkar	
5	1.3.2.05.002.007.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	000003 s/d 000005	-	2,5"		2017							Pembelian	3.000,00	Kebutuhan
															Kantor UPTD	
															(Sambungan	
															Selang	
															Pemadam	
															Kebakaran) Alat	
															Pemadam	
															Kebakaran	
															Lainnya	
6	1.3.2.05.002.007.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	000006 s/d 000008	-	1,5"		2017							Pembelian	2.250,00	Kebutuhan
															Kantor UPTD	
															DAMKAR	
															(Sambungan	
															Selang	
															Pemadam	
															Kebakaran) Alat	
															Pemadam	
															Kebakaran	
															Lainnya	
7	1.3.2.05.002.007.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	000009 s/d 000011	-			2017							Pembelian	1.500,00	Kebutuhan
															Kantor UPTD	
															DAMKAR (
															Nosse) Alat	
															Pemadam	
															Kebakaran	
															Lainnya	



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Polewali Mandar Tahun 2024

8	1.3.2.05.003.006.011	Kursi Tamu di Depan Ajudan	000001	-		Busa	2017						Pembelian	4.500,00	Kebutuhan Kantor	
9	1.3.2.07.002.005.025	Menteri/Gubernur/Bupati/Wa likota	000003	-			2017						Pembelian	850,00	UPTD Damkar (Kursi	
10	1.3.2.07.002.005.025	Alat Kesehatan Umum lainnya	000004	-			2017						Pembelian	900,00	Tamu) Kebutuhan Kantor UPTD DAMKAR (Alat	
		Alat Kesehatan Umum lainnya													Alat Farmasi Berupa Alat Kesehatan Multi Check) Kebutuhan Kantor UPTD DAMKAR (Alat-Alat Farmasi Berupa Alat Kesehatan P3K)	
1	1.3.2.01.003.005.010	Pompa Air	000007	-	1 Set	Besi	2019			MHCNMR71HKJ10	8104935	DD 8678 XY	Pembelian	15.000,00	Terletak di Mobil	
2	1.3.2.02.001.006.006	Mobil Tangki Air	000001	-	1 Roll	Besi	2019			4935			Pembelian	409.200,00	Operasional Pemadam	
3	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya Alat Kantor Lainnya	000001	-	1 Roll	Besi	2019						Pembelian	1.500,00	Kebakaran Operasional	
4	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	000002	-		Besi	2019						Pembelian	1.000,00	Pemadam Kebakaran/	
5	1.3.2.05.001.005.088	Alat Pembantu Kebakaran	000003	-		karet	2019						Pembelian	1.000,00	Mobil Pemadam Nossel	
6	1.3.2.05.002.007.016	Alat Pembantu Kebakaran Compressor	000001 s/d 000002	-		Karet Besi	2019						Pembelian	14.500,00	Pemadam Kebakaran	
7	1.3.2.05.002.007.016	Gigi	000005 s/d 000006	-		Besi	2019						Pembelian	5.000,00	Nossel / Alat Pemadam	
8	1.3.2.07.001.002.109	Crusible Penyaring	000001	-			2019						Pembelian	7.500,00	Kebakaran Nossel / Alat	
9	1.3.2.08.001.011.043		000001 s/d 000005	-			2019							5.000,00	Pemadam Kebakaran	
															Selang Pemadam Kebakaran Selang Penyemprot Mesi kompresor Tabung Apar /Pemadam Kebakaran	
1	1.3.2.05.002.007.016	Alat Pembantu Kebakaran	000007 s/d 000008	-	30m/1,5	Karet	2020						Pembelian	10.000,00	Selang Alat Pemadam Kebakaran	
1	1.3.2.02.001.006.004	Mobil Pemadam Kebakaran Mobil	000001 s/d 000003	ISUZU ISUZU		Besi Besi	2021						Pembelian	1.798.500,00		
2	1.3.2.02.001.006.004	Pemadam Kebakaran	000004				2021						Pembelian	599.500,00	dimutasikan ke Kec. Tinambung	
1	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	000187	Biro / Biro			1984						Pembelian	268,00	Meja Tulis	
1	1.3.2.06.002.001.003	Pesawat Telephone	000468	- / -			2004						Pembelian	100,00	Pesawat Telephone	
1	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro Tameng	000188 s/d 000189	Biro / Biro		Kayu Piber	2005						Pembelian	560,00	Meja Tulis Tameng	
2	1.3.2.09.004.002.028		000045 s/d 000073	-			2005						Pembelian	5.618,75		
1	1.3.2.09.002.001.011	Target Drone (Simulasi Pesawat	000392 s/d 000401	- / -			2006						Pembelian	465,00	Tali Penolong Korban	
2	1.3.2.09.002.001.069	Sasaran Tembak Udara)	000075 s/d 000080	-			2006						Pembelian	2.285,16	Helm Dalmas Snapling	
3	1.3.2.09.004.002.036	Helm Teknik alat dalmas/alat dakhura lainnya (dst)	000402 s/d 000411	-		Alkali Besi	2006						Pembelian	351,00		
1	1.3.2.09.002.001.069	Helm Teknik Pentung	000325 s/d 000340	- / -			2007						Pembelian	6.093,73	Helm Dalmas Tongkat T	
2	1.3.2.09.002.002.008		000136 s/d 000158	-		Karet	2007						Pembelian	3.565,00		
1	1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman Palu Sidang	000164	- / -			2010						Pembelian	50,00	Papan Data Pegawai	
2	1.3.2.05.002.006.042	Alat Rumah Tangga Lain-lain	000388	- / -			2010						Pembelian	50,00	Palu Sidang Kain Hijau	
3	1.3.2.05.002.006.077		000412	- / -			2010						Pembelian	150,00		
1	1.3.2.10.002.003.009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	000001	e Smile M-tech		Fiber Fiber	2016						Pembelian	150,00	Keyboard Mouse	
2	1.3.2.10.002.003.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	000001 s/d 000005				2016						Pembelian	500,00		
1	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	000007 s/d 000031	/ -			2012						PEMBELIAN	5.200,00	Loker 26 orang anggota pemadam/UPTD Pemadam	
1	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	000001	Miyako / Miyako			2015						PEMBELIAN	200,00	Dispenser/UPTD Pemadam	
1	1.3.2.07.002.005.025	Alat Kesehatan Umum lainnya	000001 s/d 000002	-			2017						Pembelian	550,00	Kebutuhan Kantor UPTD Damkar (Alat Farmasi Berupa Alat Kesehatan Tensi Meter Stoskop)	

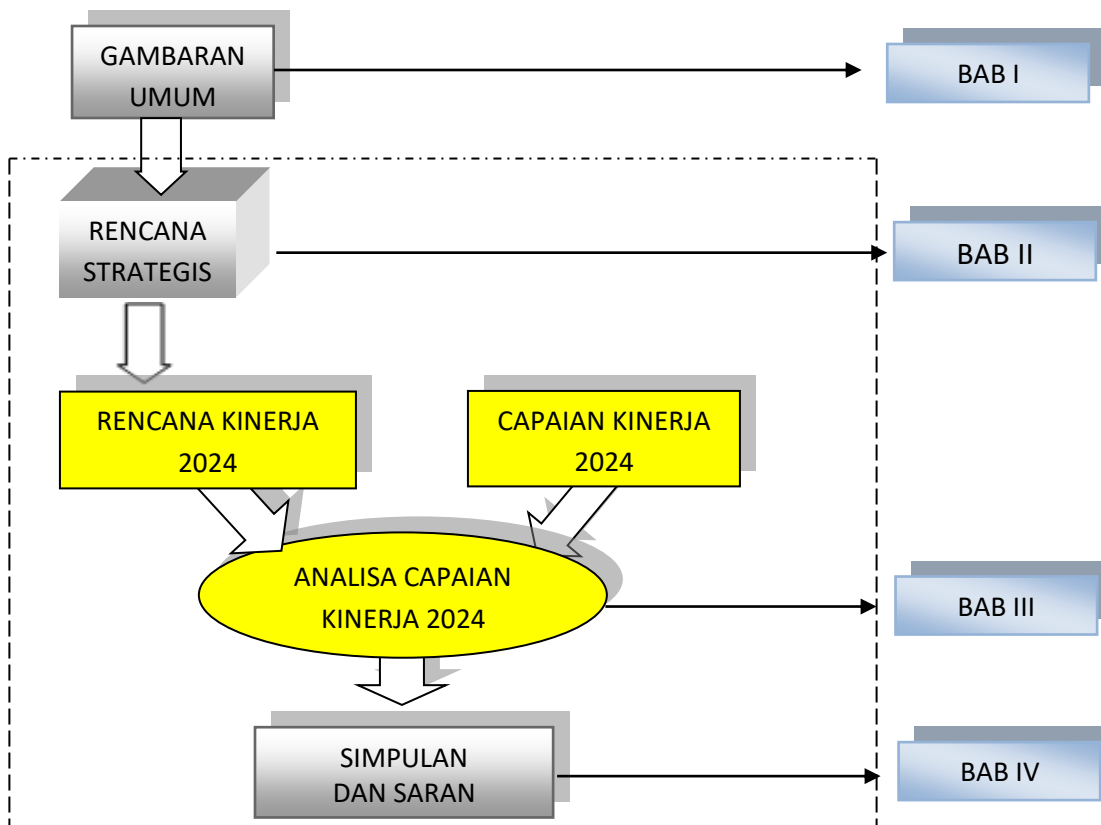


1.2.2. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2024, Capaian kinerja tersebut diperbandingkan dengan rencana kerja 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan dimungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kerja bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 dapat di ilustrasikan dalam bagan berikut :

Grafik 1

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024



Uraian singkat masing – masing Bab adalah sebagai berikut:

- BAB I Gambaran umum, menurut latar belakang penulisan LAKIP yang memuat penjelasan singkat tentang pentingnya ekuntabilitas , Dasar Hukum Penulisan Lakip, Maksud dan Tujuan penyusunan LAKIP, Kedudukan tugas, pokok dan fungsi Kondisi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Sistimatika Pelaporan LAKIP Tahun 2024
- BAB II Rencana Strategis ,memuat penjelasan singkat tentang Renstra meliputi Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja utama, Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024, Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2024.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan , Analisis Pencapaian Kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2024, Uraian Informasi terkait akutabilitas Keuangan Satuan Kerja.
- BAB IV Penutup penjelasan kesimpulan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan tahun 2024 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGI

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai rencana strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan agar tercipta Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penegakan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Untuk itu diharapkan mempunyai andil yang cukup besar dalam memelihara Keamanan dan Ketertiban di Daerah dengan bersifat proaktif dan ansipatif pada terwujudnya kesadaran masyarakat. Tuntutan atas kinerja merupakan suatu masalah serius yang dihadapi mengingat kualitas sumber daya manusia belum optimal untuk menyelesaikan segala permasalahan yang begitu kompleks dalam hal Penegakan Peraturan Daerah. Rencana Strategis tersebut disusun dengan memperhatikan berbagai faktor yang ada pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan konsep ini tidak bersifat statis melainkan dapat diubah sesuai dengan dinamika dan perubahan lingkungan strategis.

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja ini dimaksudkan untuk memberikan arah penyelenggaraan pembangunan selama 5 (lima) tahun dimulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dengan maksud menyatukan berbagai gagasan strategi dan memiliki orientasi terhadap masa depan di dukung dengan adanya Visi, Misi, Tujuan dan sasaran organisasi serta indikator target Kinerja.

2.1.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan RPJMD 2019 - 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Masuk pada Visi Bupati Polewali Mandar adalah “ **POLEWALI MANDAR MAJU RAKYAT SEJAHTERA** “

Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 - 2024



Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Polewali mandar tersebut . maka dalam RPJMD ditetapkan 4 Misi Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :



Dari keempat Misi Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Satuan Polisi Pamong Praja masuk dalam Misi ke 4 yaitu :

“MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DAN MODERN”

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

2.1.2.1 Tujuan

Tujuan RPJMD tahun 2019 - 2024 adalah *Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern* Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis Sebagai penjabaran atau penerapan misi tersebut di atas, maka ditetapkan tujuan RENSTRA yang ingin dicapai adalah :

“ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik “

Indikator dari tujuan diatas adalah Indeks Kepuasan masyarakat

1.1.2.2 Sasaran

Sasaran RPJMD tahun 2019 – 2024 adalah *“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik “* Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Untuk mencapai tujuan Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik maka ditetapkan 3 sasaran Renstra dan Target capaian Indikator antara lain :

1. Optimalnya situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat

Indikator : Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dapat diantisipasi dan terkendali

2. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan kebakaran

Indikator : Persentase kesiapsiagaan dan penanganan kejadian kebakaran memenuhi standar dan prosedur

3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah

Indikator :

- Predikat SAKIP Perangkat Daerah
- Persentase Tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah
- Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah

Adapun visi, misi ,tujuan dan sasaran dapat kita lihat ditabel berikut ini :



Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

VISI	Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera									
MISI	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Dan Modern									
	Tujuan dan Sasaran			Indikator	Satuan	Target				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Tujuan RPJMD : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern									
				Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	62.18	63.1	71	75	81
	Sasaran RPJMD : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik									
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	Tujuan Renstra:									
	1.1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik								
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Sasaran Renstra :								
		1.1.1.	Optimalnya situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat							
				Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dapat diantisipasi dan terkendali	Persen	100	100	100	100	100
		Sasaran Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
		1.1.1.1	Meningkatnya kualtiias ketentraman dan ketertiban umum							
				Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang telah	Persen	100	100	100	100	100



						ditindaklanjuti						
						Persentase gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	1000	100	100
						Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi : - Dasar	Persen	100	100	100	100	100
						Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi : - Tehnis	Persen	13	16	16	16	20
						Persentase kecamatan yang memilki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai	Persen	100	100	100	100	100
				Sasaran Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
				1.1.1.1.1	Tertanganinya Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	Gangguan	302	294	286	278	270
					Sasaran Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan							
					1.1.1.1.1.1	Terkendalnya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang berhasil dilakukan deteksi dini dan cegah dini	Potensi	3	3	3	3
					Sasaran Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa							
					1.1.1.1.1.2	Optimalnya 27indakan	Jumlah gangguan	Gangguan	302	294	286	278



						atas gangguan ketentraman dan ketertiban	ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani dengan baik						
						Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota							
					1.1.1.1.1.3	Meningkatnya kapasitas kecamatan dalam perlindungan Masyarakat	jumlah kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai	Kecamatan	1	-	1	1	1
						Sasaran Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum							
					1.1.1.1.1.4	Meningkatnya kapasitas perlindungan Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan Linmas	Orang	30	-	20	20	20
						Sasaran Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia							
					1.1.1.1.1.5	Meningkatnya kapasitas aparat Satpol PP	Jumlah Satpol PP yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP	Personil	120	30	30	40	30
						Sasaran Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum							
					1.1.1.1.1.6	Optimalnya keterpaduan dalam penanganan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah potensi gangguan ketentraman dan ketertiban dalam Operasi Pekat Kerjasama TNI/ Polri	Potensi	3	-	3	3	3
						Sasaran Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							
					1.1.1.1.2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan daerah dan	Kasus	189	167	156	134	123



						peraturan bupati yang ditindaklanjuti							
					Sasaran Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota								
					1.1.1.1.2.1	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati	Jumlah perda yang disosialisasikan	Perda	-	-	1	5	5
					Sasaran Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota								
					1.1.1.1.2.2	Terkendalnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati	Jumlah potensi Pelanggaran perda dan Perbup yang terawasi	Potensi	12	12	12	12	12
					Sasaran Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota								
					1.1.1.1.2.3	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati	Jumlah kasus Pelanggaran Perda dan perbup yang disidik dan ditindaklanjuti	Kasus	189	167	156	134	123
					Sasaran Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota								
					1.1.1.1.3	Meningkatnya kapasitas PPNS	Jumlah ASN yang memenuhi kualifikasi PPNS	ASN	4	4	4	6	6
					Sasaran Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS								
					1.1.1.1.3.1	Meningkatnya Kapasitas PPNS	Jumlah Satpol PP yang mengikuti Diklat PPNS dan Peningkatan Kapasitas PPNS	Personel	-	-	4	1	4
					Sasaran Renstra :								
					1.1.2	Meningkatnya kesiagsiagaan dan penanganan kebakaran							
							Persentase kesiapsiagaan dan penanganan kejadian kebakaran memenuhi standar dan prosedur	Persen	100	100	100	100	100
					Sasaran Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran								



			1.1.1.2	Meningkatnya kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran								
					Persentase kecamatan dengan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran memadai	Persen	94	94	94	94	100	
				Sasaran Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
			1.1.1.2.1	Optimalnya manajemen kebakaran	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Kecamatan	14	14	15	15	16	
				Sasaran Sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
			1.1.1.2.1.1	Meningkatnya kapasitas layanan pemadam kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani sesuai standar prosedur penanganan kebakaran	Kejadian	73	23	22	20	18	
				Sasaran Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan , Penanggulangan Kebakaran dan alat Pelidung diri								
			1.1.1.2.1.2	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat pelidung diri yang memadai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat pelidung diri	Unit/ Paket	1	-	4	14	1	
				Sasaran Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran								
			1.1.1.2.1.3	Meningkatnya kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah peserta pelatihan Pemadam Kebakaran	Pegawai	-	-	-	30	30	
				Sasaran Renstra:								
			1.1.3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah								
					Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	



				Persentase Tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	Persen	93,33	95,56	95,56	97,78	97,78
				Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Predikat	Baik	Baiik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
			Saran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
			1.1.3.1	Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran	Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Persen	90	100	100	100
					Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	Persen	92	96	96	96
					Persentase tertib keuangan perangkat daerah	Persen	95,56	95,56	95,56	97,78
					Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100
					Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	Persen	93,33	95,56	95,56	97,78
					Persentase tertib ketatausahaan kantor	Persen	70	75	80	85
					Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	Persen	70	75	80	85
					Persentase PNS	Persen	80	80	85	85



					perangkat daerah yang berkinerja baik							
					Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persen	65	70	75	80	85	
					Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoliran	Predikat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
				Sasaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				1.1.3.1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	Persen	95,56	95,56	95,56	97,78	97,78
					Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
				1.1.3.1.1.1	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	ASN	115	115	115	115	115
					Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD							
				1.1.3.1.1.2	Meningkatnya Tertib administrasi penatausahaan keuangan perangkat daerah	Jumlah SPM yang diterbitkan	Dokumen	130	130	130	130	130
					Sasaran Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
				1.1.3.1.1.3	Meningkatnya Kalitas Penyusunan Laporan Prognosis Relisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	19	19	19	19	19
				Sasaran Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
				1.1.3.1.2	Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persen	93,33	95,56	95,56	97,78	97,78



					Sasaran Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
				1.1.3.1.2.1	Meningkatnya tertib penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah administrasi barang daerah yang tersusun	Dokumen	6	6	6	6	6
				Sasaran Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah								
				1.1.3.1.3	Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	75	80	85	85	90
					Sasaran Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atributnya							
				1.1.3.1.3.1	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta atribut yang tersedia	Paket	13	-	30	-	239
					Sasaran Sub Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai							
				1.1.3.1.3.2	Meningkatnya Kinerja Pegawai	Jumlah Pejabat Fungsional Satpol PP yang dinilai	Orang	2	2	12	12	12
					Sasaran Sub kegiatan Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang undangan							
				1.1.3.1.3.3	Meningkatnya Kompetensi Pegawai Pada Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Tehnis	Kali	-	-	-	1	1
				Sasaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				1.1.3.1.4	Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor	Persentase Tertib Administasi Umum Kantor	Persen	75	80	85	85	90
					Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor							
				1.1.3.1.4.1	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik /penerangan	Jumlah Komponen Instalasi listrik /penerangan yang tersedia	Jenis	55	6	5	5	5
					Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
				1.1.3.1.4.2	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jenis	37	34	34	34	34
					Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor							
				1.1.3.1.4.3	Terpenuhinya kebutuhan makan dan	Jumleh jenis makanan /minumna	Jenis	3	3	3	3	3



					minum	dan logistik satpol pp						
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
				1.1.3.1.4.4	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis	3	3	3	3	3
					Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							
				1.1.3.1.4.5	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	bulan	12	12	12	12	12
					Sasaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD							
				1.1.3.1.4.6	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah	Dokumen	73	42	76	79	59
					Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusa Pemerintah Daerah							
				1.1.3.1.5	Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	Persen	75	75	80	85	90
					Sasaran Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan							
				1.1.3.1.5.1	Terpehunya kebutuhan Kendaraan dinas operasional	Jumlah Kendaraan dinas	Unit	1	-	1	-	2
					Sasaran Sub Kegiatan Pengadaan Mebel							
				1.1.3.1.5.2	Terpenuhinya kebutuhan Mebeleur kantor	Jumlah Unit mebeleur	Unit	1	3	3	3	3
					Sasaran Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya							
				1.1.3.1.5.3	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan mesin	Jumlah peralatan dan mesin kebutuhan kantor	Unit	8	13	14	8	8
					Sasaran Sub Kegiatan Pngaadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan bangunan lainnya							
				1.1.3.1.5.4	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasana pendukung gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	Jenis	-	6	3	2	2



				Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				1.1.3.1.6	Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur	Persen	75	75	80	85	90
					Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
				1.1.3.1.6.1	Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan	Jumlah Surat masuk dan keluar yang dikelola	Surat	352	352	352	352	352
					Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
				1.1.3.1.6.2	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	Bulan	12	12	12	12	12
					Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor							
				1.1.3.1.6.3	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Unit	11	11	11	11	11
					Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
				1.1.3.1.6.4	Terpenuhinya pembayaran Jasa tenaga bantu satpol pp	Jumlah jasa tenaga bantu yang terbayarkan	bulan	12	12	12	12	12
				Sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah								
				1.1.3.1.7	Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBM	Persen	77	77	77	80	80
					Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau lapangan							
				1.1.3.1.7.1	Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah unit kendraan dinas yang terpelihara	Unit	4	4	4	11	11
					Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau operasional							
				1.1.3.1.7.2	Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan	Jumlah Kendaraan yang Dilengkapi	Unit	4	4	4	11	11



					operasional	Surat Izin						
					Sasaran Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel							
				1.1.3.1.7.3	Terjaminnya kemanfaatan meleleur	Jumah jenis mebeleur yang terpelihara	Jenis	-	-	7	5	5
					Sasaran Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya							
				1.1.3.1.7.4	Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor	Luar bangunan dan halaman kantoryang terpelihara	M2	504	504	504	504	504
				Sasaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
				1.1.3.1.8	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persentase Pelaporan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	95	95	96	97	100
					Sasaran sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah							
				1.1.3.1.8.1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja /perubahan renja tahunan	Dokumen	1	1	1	1	1
					Sasaran sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD							
				1.1.3.1.8.2	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	3	3	3	3	3
					Sasaran sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD							
				1.1.3.1.8.3	Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standat dan Tepat Waktu	Laporan	3	3	3	3	3
					Sasaran sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				1.1.3.1.8.4	Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah hasil monitoring elvaluasi dan pelaporan kinerja	Laporan	2	2	2	3	3



							yang tersusun						



2.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari tiga Sasaran Strategis dan lima Indikator Kinerja Tiga Program dan sebelas kegiatan sepuluh Sub Kegiatan dengan Total Anggaran Rp11.577.269.325,- adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja serta Target Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2023	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Optimalnya situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dapat diantisipasi dan terkendali	100 %	100%
2.	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Kebakaran	Persentase kesiapsiagaan dan Penanganan Kejadian Kebakaran memenuhi standar dan prosedur	100 %	100 %
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	B
		Persentase Tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik	Baik

I. PERJANJIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Optimalnya situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah **Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dapat diantisipasi dan terkendali** Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain

1. Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang pedoman pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja



3. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi , tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar (serta informasi lain yang diperlukan dalam menjelaskan maksud dari kondisi yang ingin dicapai pada kinerja ini).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki Satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dapat diantisipasi dan terkendali</i>	<i>berisi relevansi/hubungan/ gambaran langsung Indikator Kinerja terhadap Sasaran Kinerja</i>	<i>Jumlah gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman yang ditindak lanjuti dibagi Jumlah gangguan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat yang teridentifikasi oleh SATPOL PP kali 100%</i>	<i>Data Bersumber dari Bidang Per Undang Undangan , Bidang Ketertiban Umum , Bidang Sumber Daya Aparatur dan Bidang Perlindungan Masyarakat</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indikator 1	100 %	<i>Jumlah gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman yang ditindak lanjuti dibagi Jumlah gangguan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat yang teridentifikasi oleh SATPOL PP kali 100%</i>



Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Kebakaran Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah **Persentase kesiapsiagaan dan Penanganan Kejadian Kebakaran memenuhi standar dan prosedur** Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain

1. Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota
3. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi , tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar
5. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit pelaksana teknis daerah pada Dinas dan badan dilingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

(serta informasi lain yang diperlukan dalam menjelaskan maksud dari kondisi yang ingin dicapai pada kinerja ini).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki Satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Persentase kesiapsiagaan dan Penanganan Kejadian Kebakaran memenuhi standar dan prosedur</i>	<i>berisi relevansi/hubungan/ gambaran langsung Indikator Kinerja terhadap Sasaran Kinerja</i>	<i>Jumlah Kecamatan Yang dijangkau kesiapsiagaan bahaya kebakaran Dibagi Jumlah kecamatan Dikali 100 %</i>	<i>Data Bersumber dari UPTD Pemadam Kebakaran</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :



Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indikator 1	100 %	<i>Jumlah Kecamatan Yang dijangkau kesiapsiagaan bahaya kebakaran Dibagi Jumlah kecamatan Dikali 100 %</i>

II. PERJANJIAN KINERJA **BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban umum Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah **Persentase gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman yang ditindak lanjuti** Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain

1. Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang pedoman pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi , tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar (serta informasi lain yang diperlukan dalam menjelaskan maksud dari kondisi yang ingin dicapai pada kinerja ini).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki Satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :



No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman yang ditindak lanjuti	berisi relevansi/hubungan/gambaran langsung Indikator Kinerja terhadap Sasaran Kinerja	Jumlah gangguan ketertiban, keamanan dan ketenteraman yang ditindak lanjuti dibagi Jumlah gangguan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat yang teridentifikasi oleh SATPOL PP kali 100%	Data Bersumber dari Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indikator 1	100 %	Jumlah gangguan ketertiban, keamanan dan ketenteraman yang ditindak lanjuti dibagi Jumlah gangguan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat yang teridentifikasi oleh SATPOL PP kali 100%

III. PERJANJIAN KINERJA **BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PER UNDANG UNDANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah **Persentase Kasus pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti** Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain

1. Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang pedoman pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi , tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar



(serta informasi lain yang diperlukan dalam menjelaskan maksud dari kondisi yang ingin dicapai pada kinerja ini).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki Satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Persentase Kasus pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti</i>	<i>berisi relevansi/hubungan/ gambaran langsung Indikator Kinerja terhadap Sasaran Kinerja</i>	<i>Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti dibagi Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang teridentifikasi oleh SATPOL PP kali 100%</i>	<i>Data Bersumber dari Bidang Penegakan Peraturan Per undang undangan</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indikator 2	100 %	<i>Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti dibagi Jumlah Pelanggaran Perda yang teridentifikasi oleh SATPOL PP kali 100%</i>

IV. PERJANJIAN KINERJA *BIDANG SUMBER DAYA APARATUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA* TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban umum Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah ***Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi Dasar dan Kualifikasi Tehnis*** Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain



1. Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang pedoman pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi , tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar (serta informasi lain yang diperlukan dalam menjelaskan maksud dari kondisi yang ingin dicapai pada kinerja ini).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki Satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Persentase Satpol PP yang memiliki Kualifikasi Dasar</i>	<i>berisi relevansi/hubungan/ gambaran langsung Indikator Kinerja terhadap Sasaran Kinerja</i>	<i>Jumlah Satpol PP yang memiliki kualifikasi Dasar dibagi Jumlah Aparat Satpol PP kali 100%</i>	<i>Data Bersumber dari Bidang Sumber Daya Aparatur</i>
2	<i>Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi Teknis</i>		<i>Jumlah Satpol PP yang memiliki kualifikasi Teknis dibagi Jumlah Aparat Satpol PP kali 100%</i>	

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indikator 3	100 %	<i>Jumlah Satpol PP yang memiliki kualifikasi Dasar dibagi Jumlah Aparat Satpol PP kali 100%</i>
	16 %	<i>Jumlah Satpol PP yang memiliki kualifikasi Teknis dibagi Jumlah Aparat Satpol PP kali 100%</i>



V. PERJANJIAN KINERJA **BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban umum Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah **Persentase kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai** Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain

1. Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang pedoman pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi , tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar (serta informasi lain yang diperlukan dalam menjelaskan maksud dari kondisi yang ingin dicapai pada kinerja ini).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki Satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Persentase kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai</i>	<i>berisi relevansi/hubungan/ gambaran langsung Indikator Kinerja terhadap Sasaran Kinerja</i>	<i>Jumlah kecamatan yang memiliki tenaga satlinmas yang mempunyai kualifikasoi kemampuan dasar dan Tehnis dibagi Jumlah Kecamatan kali 100%</i>	<i>Data Bersumber dari Bidang Perlindungan masyarakat</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :



Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indikator 4	100 %	<i>Jumlah kecamatan yang memiliki tenaga satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan Tehnis dibagi Jumlah Kecamatan kali 100%</i>

VI. PERJANJIAN KINERJA *UPTD PEMADAM KEBAKARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA* TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kesipasiagaan dan Penanganan Kebakaran Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah ***Persentase kesiapsiagaan dan Penanganan Kejadian Kebakaran memenuhi standar dan prosedur*** Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain

1. Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 4. Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi , tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar
 5. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit pelaksana teknis daerah pada Dinas dan badan dilingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
- (serta informasi lain yang diperlukan dalam menjelaskan maksud dari kondisi yang ingin dicapai pada kinerja ini).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki Satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :



No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Persentase kesiapsiagaan dan Penanganan Kejadian Kebakaran memenuhi standar dan prosedur</i>	<i>berisi relevansi/hubungan/ gambaran langsung Indikator Kinerja terhadap Sasaran Kinerja</i>	<i>Jumlah Kecamatan Yang dijangkau kesiapsiagaan bahaya kebakaran Dibagi Jumlah kecamatan Dikali 100 %</i>	<i>Data Bersumber dari UPTD Pemadam Kebakaran</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indikator 1	100 %	<i>Jumlah Kecamatan Yang dijangkau kesiapsiagaan bahay kebakaran Dibagi Jumlah kecamatan Dikali 100 %</i>



1. Sasaran Strategis Optimalnya situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dapat diantisipasi dan terkendali target 100 %, dengan rumus capaian adalah :

<i>Persentase Potensi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum masyarakat dapat diantisipasi dan terkendali</i>	=	$\frac{\text{Jumlah gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah gangguan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat yang teridentifikasi oleh SATPOL PP}}$	=	$\times 100\%$
---	---	---	---	----------------

Sasaran ini dilaksanakan oleh Empat Bidang pada di Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan satu program yaitu Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan Jumlah Pagu Rp 122.095.412,- dengan Sasaran Program Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban umum Target Capaian Indikator antara Lain :

1. Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang telah ditindaklanjuti
2. Persentase gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman yang ditindak lanjuti
3. Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi Dasar dan Tehnis
4. Persentase kecamatan yang memilki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai

Program ini terdiri atas tiga Kegiatan dan sembilan sub kegiatan yang di laksanakan oleh 4 Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan 2 Kegiatan 2 Sub kegiatan
 - Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Pagu anggaran Rp 3.680.000,-
 Sub Kegiatan : 1. Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati /Walikota Pagu anggaran Rp 3.680.000,-
 - Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Pagu Anggaran Rp 2.958.400,-
 Sub Kegiatan : 1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Pagu anggaran Rp2.958.400,- .

2. Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat 1 Kegiatan 2 Sub kegiatan



- Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten /Kota Pagu Anggaran Rp. 92.932.012,-

Sub Kegiatan 1. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa Jumlah Anggaran Rp 85.072.012,-

- 2. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam tehnik pencegahan dan penanganan Gangguan ketentraman san ketertiban umum Jumlah Anggaran Rp.7.860.000,-

3. Bidang Sumber Daya aparatur 1 Kegiatan 1 Sub kegiatan

- Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten /Kota Pagu Anggaran Rp.8.910.000,-

Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak asasi Manusia Jumlah anggaran Rp 8.910.000,-

4. Bidang Perlindungan Masyarakat 1 Kegiatan 2 Sub kegiatan

- Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten /Kota Pagu Anggaran Rp.13.615.000,-

Sub kegiatan : 1. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum Jumlah anggaran Rp 5.715.000.

- 2. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/ kota Jumlah anggaran Rp 7.900.000,-

- 2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kesipasiagaan dan Penanganan Kebakaran terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase kesiapsiagaan dan Penanganan Kejadian Kebakaran memenuhi standar dan prosedur Target 100% dengan rumus capaian target adalah :



$$\frac{\text{Persentase Kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran}}{\text{Jumlah Kecamatan Yang dijangkau kesiapsiagaan bahaya kebakaran}} = \frac{\text{Jumlah Kecamatan}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100\%$$

Sasaran ini dilaksanakan oleh UPTD Pemadam Kabakaran terdiri dari 1 Program yaitu Program Pencegahan , Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Pagu Rp 3.730.000.000,- pada dua Kegiatan yaitu :

- Kegiatan : Pencegahan Pengendalian ,Pemadaman , Penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten /Kota dengan Jumlah Anggaran Rp 3.730.000.000,-
- Sub Kegiatan : Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten kota Jumlah anggaran Rp 3.730.000.000,-
- Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran Jumlah anggaran Rp. 3.730.000.000,-
- Sub kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi Masyarakat jumlah anggaran Rp. 3.730.000.000,-

3. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Satpol PP terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

1. **Predikat SAKIP Perangkat Daerah** target Capaian B dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Sarpol PP Sasaran ini tegabung dalam satu Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas 1 Kegiatan 2 Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut
 - Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pagu Anggaran Rp 5.151.400,0,-
 - a. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp2.031.400,00
 - b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD Rp 3.120.000,-
2. **Persentase Tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah** target capaian 100 % dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi secretariat Satpol PP Sasaran ini



tergabung dalam satu Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas 1 Kegiatan 1 Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pagu Anggaran Rp 6.985.692.963,-
 - a. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 6.985.692.963,-
3. **Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah** target Capaian Baik dikalsanakan Oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Satpol PP Sasaran ini tergabung dalam satu Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas 4 Kegiatan 8 Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerahh Pagu Anggaran Rp. 12.774.400,-
 - a. Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pagu anggaran Rp. 12.774.400,-
2. Kegiatan : Administarsi Umum Perangkat Daerah Pagu anggaran Rp 101.819.588,-
 - a. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 10.215.108,-
 - b. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 9.776.000,-
 - c. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 4.028.180,-
 - d. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 67.800.300,-
3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Pagu Anggaran Rp 560.929.000,-
 - a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp 8.929.000,-
 - b. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 552.000.000,-
4. Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu anggaran Rp 58.806.562,-
 - a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pagu anggaran Rp 58.806.562,-

Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan Eselon III dan Eselon IV :



1. Perjanjian Kinerja antar Kepala Bidang Perundang undangan dengan Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati	Jumlah perda yang disosialisasikan	5 Perda	5 Perda

2. Perjanjian Kinerja antar Kepala Bidang Perundang undangan dengan Seksi Penyidikan dan Penyelidikan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kapasitas PPNS	Jumlah Satpol PP yang mengikuti Diklat PPNS dan Peningkatan Kapasitas PPNS	4 Orang	4 Orang

3. Perjanjian Kinerja antar Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Seksi Operasional dan Pengendalian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Optimalnya tindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban	Jumlah gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani dengan baik	84 Gangguan	84 Gangguan



4. Perjanjian Kinerja antar Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Seksi Kerjasama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Optimalnya keterpaduan dalam penanganan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah potensi gangguan ketentraman dan ketertiban dalam Operasi Pekat Kerjasama TNI/ Polri	3 Potensi	3 Potensi

5. Perjanjian Kinerja antar Kepala Bidang Sumber Daya aparatur dengan Seksi Pelatihan Dasar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1.	Meningkatnya kapasitas aparat Satpol PP	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti Dikdas dan Peningkatan Kapasitas Satpol PP	30 Orang	30 Orang

6. Perjanjian Kinerja antar Kepala Bidang Sumber Daya aparatur dengan Seksi Tehnis Fungsional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1.	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen



7. Perjanjian Kinerja antar Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dengan Seksi Satlinmas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen

8. Perjanjian Kinerja antar Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dengan Seksi Bina Potensi Masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kapasitas perlindungan masyarakat	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen

9. Perjanjian Kinerja antar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dengan dengan UPTD Pemadam Kebakaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kapasitas layanan pemadam kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	18 Warga	30 Warga



BAB III



AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1. AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011. Kedua regulasi tersebut diatas sebagai landasan normative digunakan sebagai dasar acuan dalam mengukur untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja, penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan yang mengolah kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yaitu data internal dan eksternal yang berasal dari luar instansi baik primer maupun data sekunder. Dalam pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (Rencana Tingkat Capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Sejalan dengan uraian tersebut, Kinerja Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Polewali Mandar diukur berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran, program / kegiatan serta indikator makro.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi dan analisa kinerja untuk hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui berhasil tidaknya sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

3.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi kerja, dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai tidaknya kinerja yang diharapkan. Untuk melihat capaian tersebut dapat kita lihat di bawah ini :

3.1.1.1. Capaian Sasaran 1 : Optimalnya situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat

Indikator Kinerja 1 : Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dapat diantisipasi dan terkendali Target Capaian 100 %

Untuk meningkatkan ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat Secara keseluruhan sangat didukung dengan adanya Peraturan daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum kemudian di Ganti dengan peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati , menyelenggarakan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Potensi gangguan ketentraman sebabkan dengan adanya situasi dan kondisi yang mengandung arti tidak bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikologi , sedangkan ketertiban umum disebabkan oleh adanya suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku yang dilanggar oleh orang dan atau badan hukum ,



Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban umum memiliki wewenang meliputi :

1. Mewujudkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum , budaya dan kearifan tradisi yang baik
2. Menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban umum dan ketentraman serta memberikan perlindungan dan rasa aman masyarakat
3. Menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Menegakkan hukum secara adil , pasti, bermanfaat dan efektif.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja meliputi kegiatan : Deteksi dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan , Patroli ,Pengamanan ,Pengawasan, Penertiban , Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan massa dilakukan melalui tahapan Perencanaan , Pelaksanaan dan Pelaporan .

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum satpol PP berkoordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah, Perangkat Daerah , Camat, Lurah /Kepala desa dan Ketua RW /RT atau Kepala Lingkungan .

Permasalahan yang dihadapi oleh Satpol PP adalah Jumlah gangguan Ketentraman dan ketertiban umum di daerah dari tahun ketahun semakin meningkat sehingga Satpol PP menetapkan Tujuan dan Sasaran Indikator Renstra sebagaimana pada Sasaran pertama yaitu Optimalnya situasi dan Kondisi Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dengan indikator Persentase Potensi Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dapat diantisipasi dan terkendali, Untuk melihat capaian tersebut dapat kita lihat pada Indikator Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1

Optimalnya situasi dan Kondisi Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI
1	Persentase Potensi Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dapat diantisipasi dan terkendali	Persen	100	100



Pencapaian Indikator diatas tercapai dengan beberapa kegiatan operasional Satpol PP seperti pelaksanaan Deteksi dan Cegah dini , Pembinaan dan Penyuluhan , Operasi Pekat, Patroli Wilayah Ketentraman dan Ketertiban Umum , Penertiban dan Pengamanan Kegiatan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Gangguan Trantibmas yang ditindaklanjuti Tahun 2024}}{\text{Jumlah Gangguan Trantibmas Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{6 \text{ Gangguan Trantibmas yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Gangguan Trantibmas Tahun 2024}} \times 100\% = 100\%$$

6 Gangguan Trantibmas

Faktor Penghambat Pencapaian Target Kinerja Indikator 1 :

Dalam pencapaian target kinerja indikator 1 terdapat beberapa hal yang menjadi yang menghambat dalam pencapaian target yaitu :

- Terdapat kasus pelanggaran K3 yang bukan kapasitas Satpol Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikannya seperti kasus tindak pidana umum yang mejadi kapasitas Kepolisian Negara.
- Kurangnya kordinasi antara intansi terkait dalam penyelesaian pelanggaran K 3
- Kurangnya Dana Operasional penegakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum sehingga kegiatan operasional dilapangan terbatas
- Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Satpol PP belum ada
- Kurangnya koordinasi antar SKPD yang menjadi stake holder peraturan daerah
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan yang berlaku.
- Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah yang ada sehingga masyarakat kurang mengerti dan paham akan Peraturan Daerah .
- Perbandingan Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dengan jumlah penduduk tidak seimbang
- Masih Banyak PNS Satpol PP yang belum mengikuti diklat Dasar yang diselenggarakan Kemendagri karena keterbatasan anggaran untuk mengirim personil



- Kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingku Satpol PP
- Tidak adanya biaya Pengiriman Peserta Diklat bagi Pejabat Fungsional Satpol PP
- Anggota Satpol PP belum memahami Tugas dan Fungsinya di Kecamatan
- Belum terjalin komunikasi antara Anggota Satpol PP dengan Pihak Kecamatan dalam hal penegakan Perda dan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Solusi Faktor Penghambat Pencapaian Target Kinerja Indikator 1

Untuk mengantisipasi faktor penghambat pencapaian target kinerja Indikator 1 solusi yang dilakukan yaitu menyusun Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran Program adalah Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban umum dengan Capaian Indikator Program dibagi atas 4 Indikator antara lain :

1. Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang telah ditindaklanjuti
2. Persentase gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman yang ditindak lanjuti
3. Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi Dasar dan Tehnis
4. Persentase kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai

Dari keempat indikator diatas dapat dibandingkan dengan melihat pencapaian dari tahun ketahun dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1.1.1 Indikator Kinerja 1 Sasaran Program 1 : Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti

Pencapaian Penangan kasus pada Indikator Program 1, Pelanggaran Perda sebanyak 73 Kasus dan yang ditindaklanjuti adalah 73 Kasus atau 100 % sebanyak 5 Jenis Perda 1 Perkada yang ditargetkan 5 Jenis Perda dan capaian realisasi kinerja melebihi terget dengan rincian perda sebagai berikut :

1. Perda Nomor 15 tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebanyak 15 kasus. Ditindaklanjuti 100 %
2. Perda Nomor 13 Tahun 2006 Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebanyak 3 kasus dan telah ditindaklanjuti 3 Kasus capaian kinerjanya 100%



3. Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan ketertiban umum sebanyak 12 kasus dan telah ditindaklanjuti sebanyak 12 Kasus capaian kinerja 100%,
4. Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tentang Bangunan Gedung sebanyak 4 Kasus ditindaklanjuti 4 Kasus atau 100%
5. Keputusan Gubernur Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Batu bara dan batuan sebanyak 2 Kasus ditindaklanjuti 2 Kasus atau 100 %
6. Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tentang Pengelolaan Sampah sebanyak 37 Kasus ditindaklanjuti 37 Kasus atau 100% .



Tabel 3.2

Data Pelanggaran Peraturan daerah Kab.Polewali Mandar Tahun 2024

No.	JENIS PENERTIBAN	NO. PERDA/ PERATURAN PERUNDANGAN YANG DILANGGAR	JUMLAH PENERTIBAN BULAN												TINDAK LANJUT ADMINISTRASI			PENGADILAN		KET/ JUMLAH	
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	PERINGATAN Lisan / PENYEGELAN	PENCABUTAN IZIN	DENDA	YANG LAIN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	DATA REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) / DATA PERMOHONAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IMB/ UU NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DAN UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA		2		3	1			4					5	PERINGATAN LISAN PERINGATAN TERTULIS					15 KASUS
2	DATA PENERTIBAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL	PERDA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL													3						3 KASUS
3	PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			6			6								PERINGATAN LISAN PERINGATAN TERTULIS	-	-	-	-	12 KASUS
4	BANGUNAN GEDUNG/PERUMAHAN	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG BANGUNAN GEDUNG													4	PERINGATAN LISAN PERINGATAN TERTULIS					4 KASUS
5	TAMBANG GALIAN C	KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BATUBARA DAN BATUAN							2												2 KASUS
6	PENGELOLAAN SAMPAH	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH			37																37 KASUS
																					TOTAL 73 KASUS

Jumlah kasus Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dari tahun ke tahun mengalami penurunan sebagai berikut :

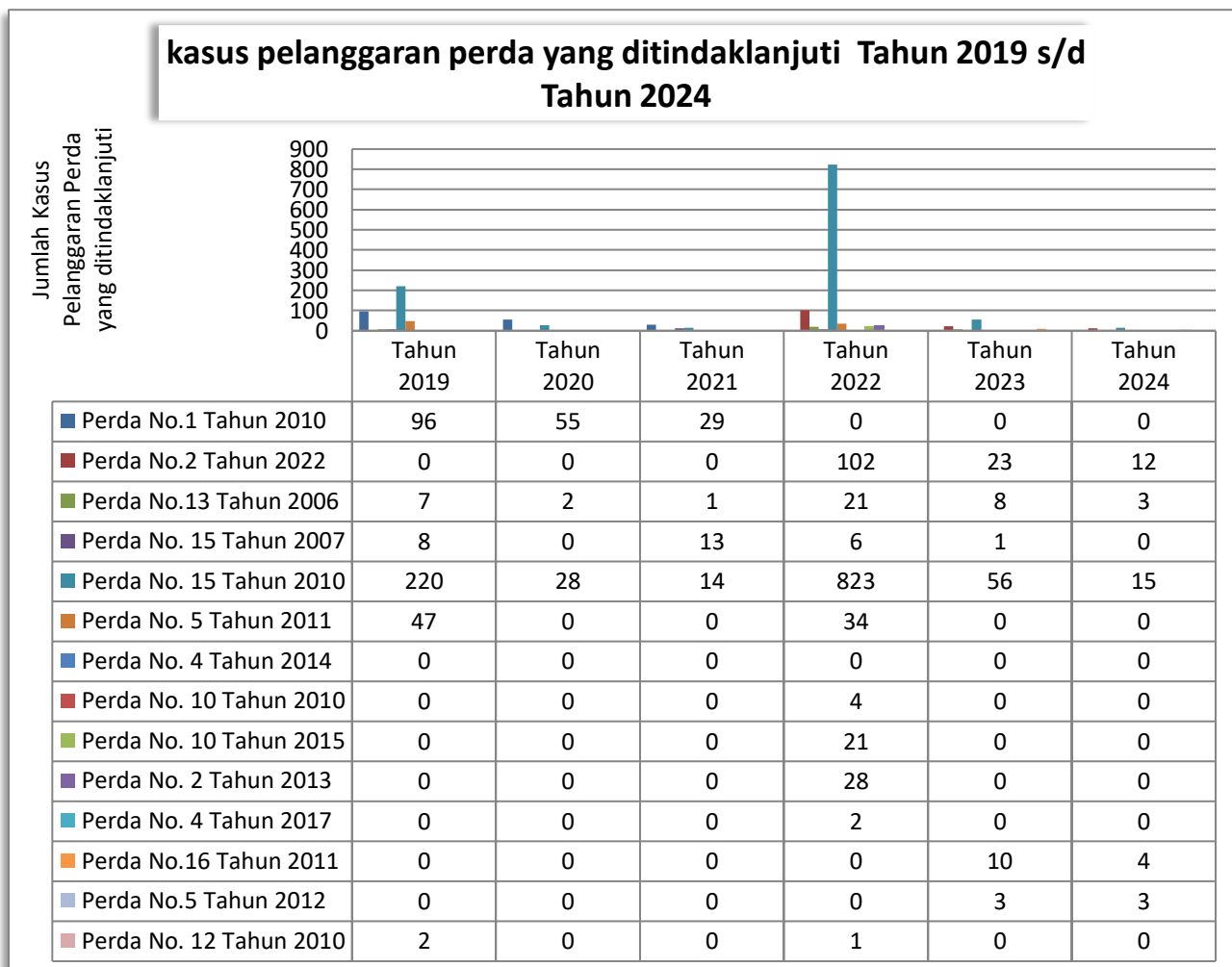
1. Tahun 2019 jumlah Pelanggaran Perda sebanyak 380 Kasus ditindaklanjuti sebanyak 380 Kasus capaian kinerja 100 %
2. Tahun 2020 sangat menurun drastis Jumlah kasus 85 Kasus Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti yaitu sebanyak 85 dari 3 Jenis Perda dengan capaian kinerja 100%
3. Tahun 2021 mengalami penurunan dengan jumlah Kasus 61 Kasus yang ditindaklanjuti sebanyak 57 Kasus atau 93 % capain kinerja.
4. Tahun 2022 mengalami Kenaikan dengan jumlah Kasus 1042 Kasus yang ditindaklanjuti sebanyak 1042 Kasus atau 100 % capain kinerja.
5. Tahun 2023 mengalami Penurunan dengan jumlah Kasus 105 Kasus yang ditindaklanjuti sebanyak 105 Kasus atau 100 % capain kinerja
6. Tahun 2024 mengalami Penurunan dengan jumlah Kasus 73 Kasus yang ditindaklanjuti sebanyak 73 Kasus atau 100 % capain kinerja

Dari data Pelanggaran Peraturan daerah 5 Tahun dapat dikategorikan bahwa masyarakat Kab. polewali mandar sebagian besar memahami dan sadar akan peraturan daerah yang berlaku di daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Dalam grafik dibawah ini :



Grafik 2. kasus pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti



Upaya Satuan Polisi Pamong praja dalam Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Perda dengan dilakukan beberapa Kegiatan seperti Operasi Yustisi ,Sosialisasi dan Pengawasan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah .

Adapun beberapa kasus pelanggaran Perda yang perlu penindakan khusus dengan Menyerahkan Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah Kepada PPNS untuk dilakukan Proses Penyidikan.

1. Sosialisasi dan Pengawasan Peraturan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten polewali mandar dan Perbup nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi , tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar pada Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan memiliki tugas pokok melakukan Penyuluhan atau Sosialisasi Peraturan Daerah. Tahun 2024 pada Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati /Walikota satpol PP melakukan Pembinaan dan Pengawasan beberapa perda antara lain :

1. Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak
2. Perda Nomor 15 tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan
3. Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan ketertiban umum
4. Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol
5. Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah

Dilaksanakan lima kali dalam kurung waktu satu tahun pada tahun 2024 , diwilayah Kabupaten Polewali Mandar , kegiatan ini dengan sasaran masyarakat yang belum memahami adanya Peraturan Daerah yang berlaku di wilayah kabupaten Polewali Mandar.

Kegiatan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah di tahun 2024 Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar berkolaborasi dengan Satpol PP Provinsi Sulawesi barat melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah diwilayah hukum Kabupaten Polewali Mandar



Gambar. 1

Sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak



Gambar. 2

Pembinaan dan Pengawasan Perda Nomor 15 tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan





Gambar. 3

Pembinaan dan Pengawasan Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketertarikan dan ketertiban umum



Gambar. 4

Pembinaan dan Pengawasan Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol



Gambar. 5
Pembinaan dan Pengawasan Tambang Galian C



Gambar. 6

Pembinaan dan Pengawasan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah



A. Penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum





Gambar 7.
 Penertiban Pedagang Kaki Lima



Gambar 8.
 Pedagang Kaki Lima Yang
 Melanggar Menandatangani
 Surat Pernyataan



Gambar 9.
 Penertiban Penyakit
 Masyarakat / Kos Kosan



Gambar 10.
 Penertiban Anak Jalanan
 (Anak Punk)

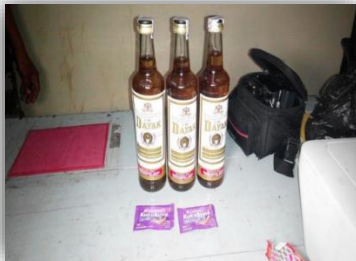


B. Penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Gambar 11.
Penertiban Peredaran
Minuman beralkohol



Gambar 12.
Barang Bukti Miras yang
ditertibkan



Gambar 13.
Penyerahan Berkas Perkara
Kasus Miras Ke Pengadilan
Negeri , Pelaksanaan Sidang
Tipiring di Pengadilan Negeri
Polewali, dan Pemusnahan
Barang Bukti



C.Penegakan Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban ternak

Gambar 14.
Penertiban Ternak Yang Berkaliaran Tanpa
dikembalikan Oleh Pemiliknya



Gambar 15.
Pemeriksaan Terhadap Pemilik ternak
Yang Berkeliaran tanpa dikembalikan



D. Penegakan Perda Nomor 15 tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan

Gambar 16.
Pendataan / Pengawasan Bangunan yang
tidak memiliki IMB



E. Penegakan Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan dan catatan sipil

Gambar 17.
Operasi Yustisi Perda Nomor 5 Tahun 2011
(Menjaring Masyarakat yang tidak membawa
KTP)



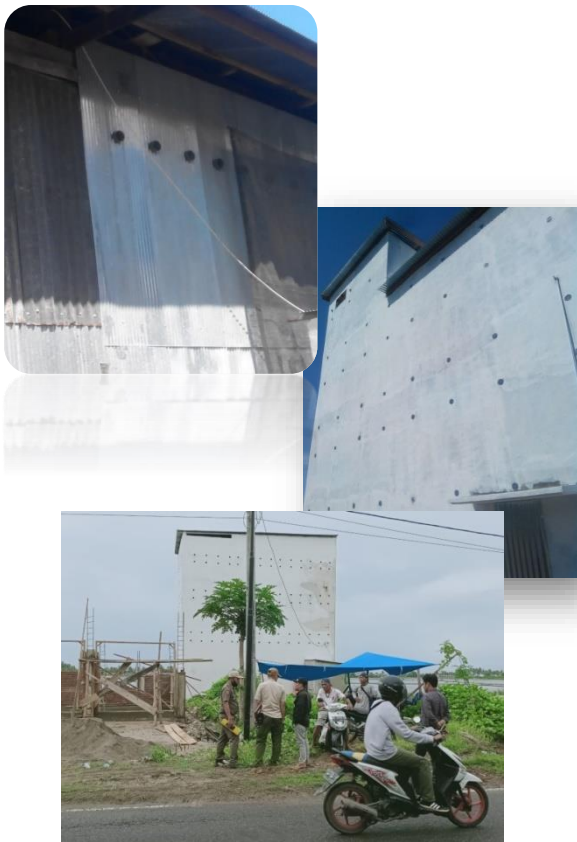
Gambar 18.
Pemeriksaan Oleh PPNS Terhadap
Masyarakat yang tidak membawa KTP



Gambar 19.
Proses Persidangan Tindak Pidana Ringan
(Operasi YustisiKTP)



F. Penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet



Gambar 20.
Penertiban Sarang Burung Walet

3.1.1.1.2 Indikator Kinerja 2 Sasaran Program 1 Persentase Gangguan Keamanan Ketertiban dan Ketentraman yang ditindaklanjuti

Satuan Polisi Pamong Praja telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran, tetapi pada kenyataan yang terjadi dilapangan masih banyaknya masyarakat yang kurang sadar mengenai aturan-aturan yang ada sehingga memakai fasilitas umum dalam melakukan perbuatan asusila contohnya : menggunakan tempat kost-kos'tan, stadion olah raga, TPI (Tempat Pelelangan Ikan) serta tempat-tempat umum lainnya untuk berbuat yang tidak sesuai dengan Peraturan, Etika, Norma Budaya dan Nilai-nilai Agama di Kabupaten Polewali Mandar

1. Operasi / Patroli Keamanan , Ketertiban dan Ketentraman masyarakat (K3) .

Pelaksanaan Patroli K3 ini adalah kegiatan pelaksanaan rutin bagi aparat Satuan Polisi Pamong praja yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan desember 2024 yang melibatkan sebanyak 6 s/d 10 orang aparat Satpol PP dalam satu kali kegiatan. Sasaran kegiatan ini adalah gangguan Ketertiban umum yang dikategorikan menjadi 10 kategori tertib antara lain :

1. Tertib Jalan dan angkutan jalan:
2. Tertib Sosial
3. Tertib lingkungan
4. Tertib Jalur Hijau, Taman dan tempat Umum
5. Tertib Sungai , drainase dan sumber air
6. Tertib Usaha tertentu
7. Tertib PKL
8. Tertib reklame
9. Tertib bangunan
10. Tertib Ruang



DATA KASUS KETENTRMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DITINDAKLAJUTI TAHUN 2023

[illegible]

Untuk mencapai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Secara keseluruhan Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan PPNS telah berhasil melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi mengawal Peraturan dan Daerah dan Peraturan Bupati . Untuk melihat capaian tersebut dapat kita lihat pada beberapa Indikator Kinerja .

Persentase gangguan K 3 (Ketertiban, Keamanan dan Ketentraman) yang ditindak lanjuti sesuai standar prosedur.

Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) meliputi : Penertiban Anak Sekolah, Penertiban Pedagang kaki Lima, Penertiban Baleho/Spanduk, Penertiban Kost-Kosan, Anak jalanan, dan Pengamanan. Kasus Pelanggaran Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat Tahun 2019 Jumlah Kasus 122 Kasus terselesaikan 100% .

Tahun 2020 sebanyak 65 Kasus ditindaklanjuti sebanyak 58 Kasus Jumlah angka Kasus K3 berkurang dibandingkan jumlah Kasus K3 tahun sebelumnya,

Jumlah Kasus K3 Tahun 2021 berdasarkan Pengaduan masyarakat dan Temuan langsung Petugas dilapangan sebesar 30 Kasus dan ditangani 29 Kasus 96,67 %

Jumlah Kasus K3 Tahun 2022 sebanyak 143 Kasus di tindaklanjuti semua 143 kasus atau 100% dari jumlah tersebut sebanyak 21 Kasus adalah sumber dari Pengaduan Masyarakat dan 122 Kasus temuan langsung Satpol PP di lapangan. 21 Kasus

Jumlah Kasus Pelanggaran K3 Tahun 2023 sebesar 19 Kasus ditindaklanjuti 19 Kasus atau 100% sangat turun drastis dari tahun 2022

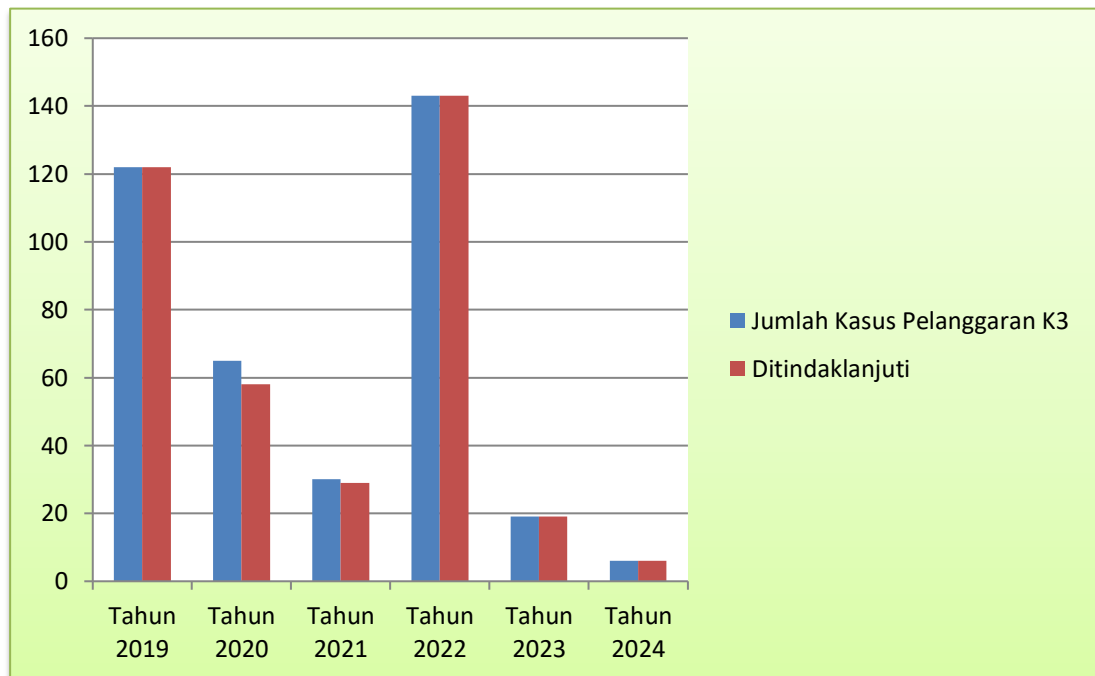
Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum tahun 2024 sebesar 6 Kasus ditindak lanjuti semua atau 100%



dikategorikan Penanganan Gangguan K3 cukup berhasil dan besarnya kesadaran Masyarakat dilihat dari Jumlah K3 Tahun 2023 sebesar 19 Kasus turun menjadi 6 Kasus ditahun 2024.



Grafik.3 Persentase kasus Ketertiban, ketentraman dan keindahan yang ditindaklanjuti



untuk mencapai indicator 2 Sasaran Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dengan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten /Kota Pada sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa Rp.85.072.012,- realisasinya Rp 85,061,740 ,- atau 99,9%, Indikator Kinerja Jumlah Penanganan gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum Target 60 Kali capaian 60 Kali
2. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam tehnik pencegahan dan penanganan Gangguan ketentraman san ketertiban umum Pagu anggaran Rp 7.860.000,- realisasi Rp.7.860.000 atau 100% indikator Kinerja Jumlah Pelaksanaan Operasi Pekat Kerjasama TNI/POLRI target 1 kali Capaian 1 Kali atau 100 %



Dengan direalisasikan Program kegiatan Prioritas Satpol PP Tahun 2024 pada 3 Sub Kegiatan untuk mencapai indikator Kinerja dapat dilihat dari beberapa output Kegiatan Satpol PP Kab. Polewali Mandar pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Patroli Wilayah Trantibum

Pelaksanaan Patoli wilayah Trantibum dilaksanakan rutin di wilayah Kecamatan Polewali dan Wonomulyo yang melibatkan 6 sampai 10 orang Personil

Pengawasan dan Patroli terhadap Personil Satpol PP yang bertugas dip Pos Penjagaan dilakukan oleh Petugas Internal Satpol PP (PTI) setiap hari dengan Jumlah PTI Satpol PP sebanyak 5 Orang

Gambar 21
Pengawasan oleh Petugas Tindak Internal



Gambar 22
Pengawasan dan Apel Pengecekan Pasukan





Gambar 23
Pelaksanaan Patroli Wilayah Trantibum



2. Penanganan Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban umum

Pelaksanaan Pengamanan ,Penertiban dan Pengawalan adalah tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai mana diatur dalam Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis SOP Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam pelaksanaan Penanganan Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban umum Satpol PP membentuk beberapa unit yang melibatkan personil dalam pelaksanaan kegiatan diberikan tugas dan wewenang masing masing antara lain :

1. Petugas Pengendalian Masyarakat (DALMAS) 31 Orang Personil
2. Petugas Tindak Internal (PTI) 5 Orang Personil
3. Petugas Lidik 5 Orang Personil

4. Petugas Pengamanan Aset Pos Penjagaan Kantor Bupati ,Kantor DPRD , Rujab Bupati, Rujab Wakil Bupati ,Rujab Sekretaris Daerah dan Pos Alun Alun 123 Orang
5. Petugas Trantib Kecamatan 22 Orang Personil
6. Petugas Administrasi dan Operasional Lapangan
 - Pejabat Eselon 16 orang
 - Staf 14 Orang

Beberapa Aset Daerah seperti Kantor Bupati ,Kantor DPRD , Rujab Bupati, Rujab Wakil Bupati ,Rujab Sekretaris Daerah dilakukan Pengamanan 1 x 24 Jam secara bergantian oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan 93 Orang Personil Satpol PP.

Gambar 24
Dokumentasi Pengamanan di Setiap Pos dan Pengawasan oleh PTI Satpol PP



Pos 1 Kantor Bupati



Pos 2 Kantor Bupati (Dalmas)



Pos Rujab Wakil Bupati



Pos Rujab Bupati



Pos Rujab Sekretaris Daerah



Pos Kantor DPRD

Selain Petugas Pengamanan Aset Daerah adapun Tim Dalmas Satpol PP yang melaksanakan Pengamanan ,Penertiban dan Pengawalan seperti Pengamanan Aksi Ujuk Rasa , Penertiban Gannguan K3, Pengamanan Kegiatan Acara Kabupaten dan Upacara Besar dan Pengawalan Pejabat dan Tamu VIP . disetiap Kegiatan di Tugaskan Anggota lidik untuk turun terlebih dahulu melakukan survei dilapangan kemudian memberikan laporan awal kondisi dan situasi dilapangan.

Jumlah Aksi Unjuk Rasa/ Aksi Damai dan Kerusuhan Massa Tahun 2024

Jumlah Aksi unjuk rasa tahun 2024 di wilayah Hukum Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 6 Aksi yang dilakukan oleh Unsur Masyarakat, Mahasiswa dan Bebarapa Lembaga di beberapa titik dengan aksi Damai, berikut daftar aksi unjuk rasa :

Tabel 3.4

NO	TANGGAL KEJADIAN	TEMPAT	NAMA/ORMAS,ALAMAT YANG MELAKUKAN UNJUK RASA	MAKSUD DAN TUJUAN	JUMLAH MASSA	AKSI		KET
						ANARKIS	DAMAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28 Oktober 2024	Kantor Bupati Polewali Mandar	PMII IAI Polewali	unjuk Rasa oleh PMII IAI Polewali menuntut pencopotan PJ.Bupati	15 Orang		x	Politik
2	21 November 2024	Kantor Bupati Polewali Mandar	PMII Cab. Polman	unjuk Rasa Oleh PMII Cab. Polman menuntut Tata kelola Pemkab.Polman	30 Orang		x	Politik
3	12 Desember 2024	Kantor Bupati Polewali Mandar	PMII Cab. Polman	Unjuk Rasa Pmii Menuntut Copot direktur RSUD H.A.Depu, Usut tuntas pengelolaan Keuangan Pemkab Polman	25 orang		x	Politik
4	13 Desember 2024	Kantor Bupati Polewali Mandar	HMI	Unjuk Rasa Hmi 13 Desember 2024, Menuntut Transparansi gaji PPPK,Adili mantan Kabag umum,Copot PJ.Bupati	40 orang		x	Politik
5	16 Desember 2024	Kantor Bupati Polewali Mandar	PMII Cab. Polman	Unjuk Rasa Pmii Menuntut perbaikanTata kelola keunagan daerah,menuntut pencopotan pj.bupati	30 orang		x	Politik



6	23 Desember 2024	Kantor Bupati Polewali Mandar	PMII Cab. Polman	unjuk Rasa oleh PMII Polman mengenai Defisit anggaran yang terjadi di Polman.	20 orang		x	Politik

Gambar 25

FOTO DOKUMENTASI UNJUK RASA TAHUN 2024





3.				
4.				



5.				



Tabel 3.5

Data Unjuk Rasa Kab.Polewali Mandar

No.	Uraian	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bidang Politik	5	-	4	-	3	7	7	6
2	Ekonomi	1	16	1	-	2	10	6	-
3	Kasus Pemogokan Kerja	-	-	1	-	-	-	-	-
Jumlah		6	16	6	-	5	17	13	6



3. Operasi Pekat

Pelaksanaan Operasi Pekat dilaksanakan rutin di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan melibatkan Unsur PPNS dan anggota Satpol PP , TNI, Polri dan OPD terkait

Tahun 2024 telah dilaksanakan Operasi Pekat yang melibatkan Satpol PP, PPNS Korwas PPNS, TNI dan Polri Sasaran kegiatan operasi pemberantasan penyakit Masyarakat (Pekat) berupa Penertiban Rumah Kos kosan, Penginapan, Hotel penjualan minuman beralkohol , narkoba, anak gelandangan, pengamen dan gangguan K3 Lainnya hasil dilapangan antara lain :

1. Ditemukan 2 Pasang mesum (belum pernah menikah) di Kos Kosan Kecamatan Wonomulyo dan Polewali

Tindak lanjut atas Pelanggar Ketertiban umum sebagaimana diatur Pada Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum berupa tindakan persuasif pembinaan seperti pemberian surat Teguran dan Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi kembali pelanggaran yang telah dilakukan.

Gambar 26.

Operasi Pekat (Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)



Gambar 27
Proses Penindakan terhadap Pelanggar K3 ,Pasangan bukan Suami Isteri
(Proses Pemeriksaan dan Penandatanganan Surat pernyataan)



**3.1.1.1.3 Indikator Kinerja 3 Sasaran Program 1 : a. Persentase Satpol PP yang memiliki Kualifikasi (Dasar)
b. Persentase Satpol PP yang memiliki Kualifikasi (Tehnis)**

Tabel 3.6

Meningkatnya Kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1 Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi :				
- Dasar	Persen	74	43	43
- Tehnis	Persen	3	10	10

Persentase anggota Satpol PP yang memiliki Kualifikasi Dasar :

Berdasarkan Capaian Indikator kinerja Persentase anggota Satpol PP yang memiliki Kualifikasi Dasar dari target 74 Persen yang terealisasi 34 % dapat uraikan sebagai berikut :



Jumlah anggota Satpol PP yang ada sebanyak 238 orang terdiri dari 95 PNS 121 orang Tenaga Bantu Satpol PP , sedangkan PNS yang telah memenuhi standar kompetensi dasar Satpol PP sebanyak 40 orang sehingga persentase capaian sebesar 43 % dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Satpol PP (PNS) yang telah memenuhi kualifikasi Dasar Satpol PP}}{\text{Jumlah Personil Satpol PP Kab.Polewali Mandar (PNS)}} \times 100 \%$$

$$\frac{40 \text{ Orang}}{95 \text{ Orang}} \times 100\% = 42 \%$$

95 Orang

Persentase anggota Satpol PP yang memiliki kualifikasi Tehnis :

Berdasarkan Capaian Indikator kinerja Persentase anggota Satpol PP yang memiliki Kualifikasi Tehnis dari target 3 Persen yang terealisasi 10 % dapat uraikan sebagai berikut :

Jumlah PNS Satpol PP yang ada sebanyak 95 , sedangkan PNS yang telah kualifikasi Tehnis sebanyak 9 orang dengan rincian :

- Tehnis PPNS 5 Orang
- Tehnis Bela Negara 4 Orang

sehingga persentase capaian sebesar 10 % dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Satpol PP (PNS) yang telah memenuhi kualifikasi Tehnis}}{\text{Jumlah Personil Satpol PP Kab.Polewali Mandar (PNS)}} \times 100 \%$$

$$\frac{9 \text{ Orang}}{95 \text{ Orang}} \times 100\% = 9 \%$$

95 Orang

Jumlah Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Satpol PP sebanyak 5 orang .

Satpol PP Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja .

Peraturan MenPAN dan RB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya bertujuan mendorong profesionalisme Polisi Pamong Praja untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kemendagri sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Jafung Pol PP) melalui Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen BAK). Pasal 38 Peraturan MenPAN dan RB Nomor 4 Tahun 2014 memberi kesempatan kepada Pol PP yang bertugas saat ini menjadi Jafung Pol PP melalui Inpassing atau penyesuaian dalam jabatan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PNS yang disesuaikan (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Terampil, harus memenuhi syarat sebagai berikut:



1. berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat ;
2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
3. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
4. memiliki pengalaman di bidang Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
7. mengikuti dan lulus uji kompetensi.

PNS yang disesuaikan (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Ahli, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;
2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
3. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
4. memiliki pengalaman dibidang Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
7. mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Untuk menjadi Jafung Pol PP melalui inpassing maka setiap PNS Pol PP harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri telah menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional melalui Surat Edaran (SE) Mendagri No. 800/120/SJ tanggal 15 Januari 2016, yang memuat 18 unit kompetensi Tingkat Ahli dan 14 unit kompetensi Tingkat Terampil.

Uji kompetensi dilakukan oleh Asesor Kompetensi dengan menggunakan instrumen uji yaitu uji tertulis dan verifikasi dokumen portofolio yaitu setiap asesi (peserta uji kompetensi) harus membawa 2 (dua) bukti kerja berupa Surat Perintah dan Laporan untuk setiap unit kompetensi yang diujikan. Apabila hasil uji tertulis dibawah batas nilai minimum (60) maka asesi akan diberikan kesempatan mengikuti uji lisan (wawancara) sesuai dengan nilai unit kompetensi yang kurang pada uji tertulis.

Unit kompetensi yang diuji untuk asesi Jafung Pol PP Tingkat Ahli ada 5 (lima) unit kompetensi yaitu

1. melakukan koordinasi penegakan Perda;
2. melakukan tindakan non yustisi;
3. melakukan patroli;
4. melakukan pengendalian masa; dan
5. melakukan mobilisasi perlindungan masyarakat.

Untuk asesi Jafung Pol PP Tingkat Terampil ada 4 (empat) unit kompetensi yaitu:

1. melakukan tindakan non yustisi;
2. melakukan patroli;
3. melakukan pengendalian masa; dan



4. melakukan pendataan dan pelatihan perlindungan masyarakat.

Dari beberapa persyaratan memenuhi syarat kompetensi untuk menduduki jabatan fungsional Satpol PP beberapa persyaratan telah dipenuhi anggota Satpol PP kab. Polewali Mandar dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.7
Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi Standar Kompetensi

Aspek		Satpol PP	Damkar
1	Pendidikan		
	-SLTA	124	86
	- DIPLOMA	3	1
	- SI	84	6
	- S2	5	2
2.	Diklat	40	-
	- Diklat dasar Satpol PP	5	-
	- Diklat PPNS	4	-
	- Diklat Bela Negara	95	-
	- Bimtek Peningkatan Kap Satpol PP	-	2
	- Bimtek Pemahaman Dasar Damkar	-	-
	- Pendidikan Pemadam Kebakaran Kelas A – D		
3.	Pangkat /Gol Ruang		
	- Pembina Utama Muda / IV c	1	-
	- Pembina Tk.I / IV b	1	-
	- Pembina / IV a	1	-
	- Penata Tk. I / III d	10	1
	- Penata / III c	38	1
	- Penata Muda Tk.I / III b	12	-
	- Penata Muda / III a	11	-
	- Pengatur Tk.I / II d	17	-
	- Pengatur / II c	4	-
	- Pengatur Muda / II a	-	1
	- Juru Tk. I / I d	-	1
	- PPPK	-	10
	- Pegawai Tidak tetap	121	83



Gambar 27.
Bimtek Peningkatan Kapasitas Satpol PP Tahun 2022



Gambar 28 .
Peningkatan Kapasitas Aparat Satpol PP (Pelatihan Huru Hara) Tahun 2023 dan 2024



Rasio pendistribusian Satpol PP terhadap jumlah Kecamatan 1 : 1

Rasio pendistribusian anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tahun 2016 adalah 1 : 1. Sedangkan pada tahun 2017 masih tetap 1 : 1 terhadap jumlah kecamatan. Pada Tahun 2018 dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, ada 16 anggota Satpol PP yang tugaskan di 13 Kecamatan (87,5%). Begitu juga dengan tahun 2015 dan 2016 masih tetap 13 kecamatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan, itupun penyebaran tersebut tidak merata 1 : 1 karena pertimbangan trend gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan yang berbeda. Sedangkan untuk

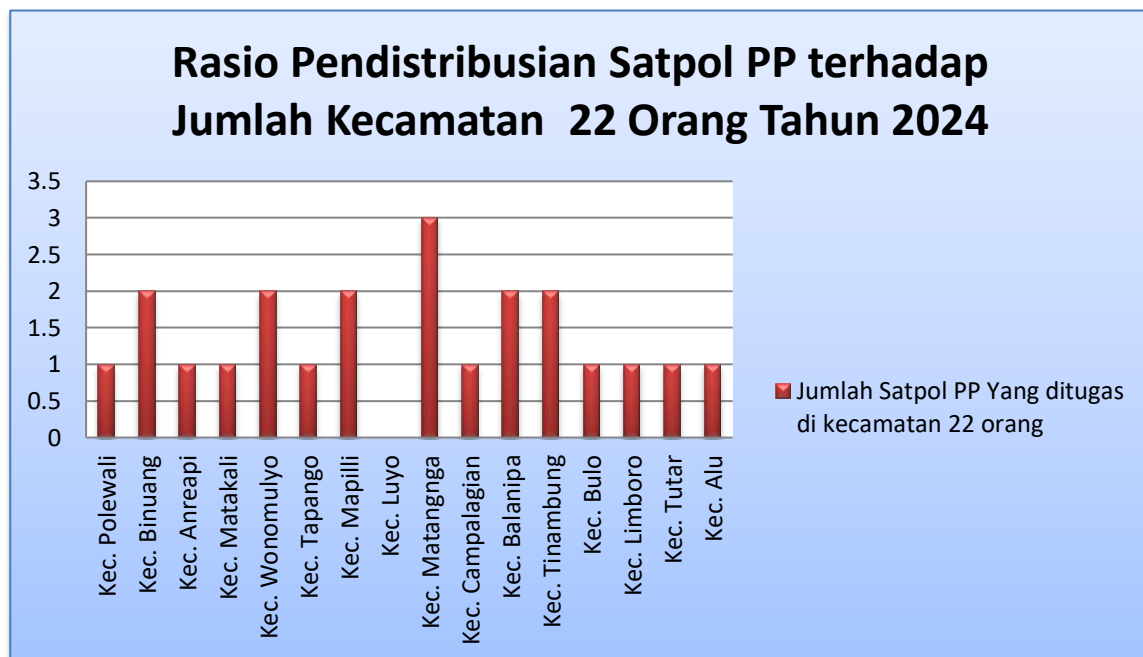
tahun 2021 ditempatkan 16 kecamatan dengan jumlah personil Satpol PP sebanyak 34 orang
Tahun 2022 Sebanyak 27 Orang personal yang ditempatkan di 15 Kecamatan.

Tahun 2023 Sebanyak 22 Orang

Penyebaran Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan tidak merata disesuaikan dengan tingkat kerawanan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Untuk 4 kecamatan pelosok personil Satpol PP yang ditugas1 Orang 1 Kecamatan antara lain Kecamatan , Limboro,Tutar dan alu , Kecamatan Wonomulyo 2 orang Polewali 4 orang

Untuk lebih jelasnya tentang pendistribusian Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 4. Pendistribusian Satpol PP terhadap Jumlah Kecamatan



3.1.1.1.4 Indikator Kinerja 4 Sasaran Program 1 : Persentase Kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan tehnis yang memadai



Tabel 3.8 Meningkatnya Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1 Persentase Kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan tehnik yang memadai	Persen	81	14 Kecamatan	87,5

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah Linmas menggambarkan kapasitas partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat guna terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif.

Jumlah Kecamatan yang telah memiliki tenaga satlinmas yang mempunyai kualifikasi tehnik yang memadai adalah 14 Kecamatan dapat dilihat pada tabel daftar tenaga Satlinmas yang telah dilatih di Kabupaten sebagai berikut :



Tabel 3.9

Daftar tenaga Satlinmas yang telah dilatih di Kabupaten

No.	Nama Peserta	Jenis Kelamin	UTUSAN	Alamat	Pelaksanaan		Penyelenggara
					Tempat	Waktu	
1	MARZUKI	L	KEC. POLEWALI	KEC. POLEWALI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
2	SARBING	L	KEC. POLEWALI	KEC. POLEWALI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
3	AFRAN	L	KEC. POLEWALI	KEC. POLEWALI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
4	MASRIANTO	L	KEC. BINUANG	KEC. BINUANG	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
5	EDI BIN PONRENG	L	KEC. BINUANG	KEC. BINUANG	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
6	ASLAM	L	KEC. ANREAPI	KEC. ANREAPI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
7	SAPARUDDIN	L	KEC. ANREAPI	KEC. ANREAPI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
8	JUSSAM	L	KEC. BULO	KEC. BULO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
9	HAMRAN	L	KEC. BULO	KEC. BULO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
10	WILONO	L	KEC. WONOMULYO	KEC. WONOMULYO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
11	BASIRUN	L	KEC. WONOMULYO	KEC. WONOMULYO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
12	SHUBRI	L	KEC. MAPILLI	KEC. MAPILLI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
13	NAWIR	L	KEC. MAPILLI	KEC. MAPILLI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
14	NURSAHIDA	P	KEC. CAMPALAGIAN	KEC. CAMPALAGIAN	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
15	SUKRI	L	KEC. CAMPALAGIAN	KEC. CAMPALAGIAN	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
16	AL[L	KEC. TAPANGO	KEC. TAPANGO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
17	SUMARDI	L	KEC. TAPANGO	KEC. TAPANGO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
18	LU'DIN	L	LEC. LUYO	LEC. LUYO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
19	HARI	L	KEC. LUYO	KEC. LUYO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
20	SAPRIADI	L	KEC. ALU	KEC. ALU	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
21	MUHDAR	L	KEC. ALU	KEC. ALU	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
22	MUHAMMAD ASRUL	L	TINAMBUNG	TINAMBUNG	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
23	SALEH SAYANG	L	KEC. TINAMBUNG	KEC. TINAMBUNG	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
24	IBRAHIM SUAIB S.PD	L	KEC. BALANIPA	KEC. BALANIPA	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
25	NIRMA, SE.	L	KEC. BALANIPA	KEC. BALANIPA	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
26	MUSTAMIN	L	KEC. LIMBORO	KEC. LIMBORO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
27	SUPRIADI	L	KEC. LIMBORO	KEC. LIMBORO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
28	MUSLIMIN, A.	L	KEC. MATAKALI	KEC. MATAKALI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
29	HASAN	L	KEC. MATAKALI	KEC. MATAKALI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
30	MUHAJIR	L	KEC. MATAKALI	KEC. MATAKALI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP

Jumlah Kecamatan yang Mengutus Tenaga Satlinmas pelatihan x 100%

Jumlah Kecamatan

14 Kecamatan 100% = 87,5 %

16 Kecamatan



Perbandingan Tenaga satuan Perlindungan Masyarakat ditingkat Dusun adalah 1 Dusun 1 Orang anggota Linmas

Dengan Jumlah tenaga Satlinmas di wilayah Kabupaten Polewali Mandar adalah 2454 orang Sehingga Rasio Perbandingan 1 : 1 harus ditingkatkan menjadi 1 : 2 (satu Dusun 2 anggota Linmas) dan dibutuhkan pelatihan Dasar bagi Satuan Perlindungan Masyarakat .

3.1.1.2. Capaian Sasaran 2 : Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Kebakaran

Indikator Kinerja : Persentase Kesiapsiagaan dan Penanganan kejadian kebakaran memenuhi standar dan Prosedur

Tabel 3.10

Meningkatnya Kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran i	Persen	88	14 Kecamatan	87,5

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit pelaksana teknis daerah pada Dinas dan badan dilingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar UPTD Pemadam kebakaran bergabung dibawah naungan Satpol PP dengan tingkat Eselon IV B terhitung Januari 2023 dengan Jumlah personil Damkar 97 Orang terdiri 4 orang PNS , 10 Orang PPPK dan 83 Orang Non PNS .

Jumlah Kendaraan Pemadam yang beroperasi sebanyak 7 unit jangkauan Wilayah Manajemen Kebakaran Tahun 2024 adalah 120.137 Ha dengan 14 Kecamatan antara lain :

1. Kecamatan Polewali
2. Kecamatan Binuang
3. Kecamatan anreapi
4. Kecamatan Matakali



5. Kecamatan Tapango
6. Kecamatan Mapilli
7. Kecamatan Campalagian
8. Kecamatan Luyo
9. Kecamatan Tinambung
10. Kecamatan Balanipa
11. Kecamatan Limboro
12. Kecamatan Alu
13. Kecamatan Bulu
14. Kecamatan Wonomulyo

Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit 88 Kali tertangani semua .

Tabel 3.11

Cakupan pelayanan bencana kebakaran wilayah kabupaten

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	Ha	120.137	120.137	120.137	120.137	120.137
2.	Luas Wilayah kabupaten	Ha	202.230	202.230	202.230	202.230	202.230
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota		%	59%	59%	59%	59%	59%

Tabel 3.12

**Tingkat waktu tanggap (*response time rate*)
daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	kali	20	19	46	88	60
2.	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	kali	23	22	46	88	60
Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK			86,9%	86,3%	100%	100%	100%



Untuk Tahun 2024 Jumlah Bencana Kebakaran di Wilayah Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 60 bencana Kebakaran diantaranya :

1. Kebakaran Bangunan dan Kendaraan sebanyak 49 Kebakaran
2. Kebakaran Lahan sebanyak 11 Kebakaran

**Gambar 29 .
Penanggulangan Bencana Kebakaran**



Berikut Jumlah Kebakaran Berdasarkan Wilayah di Tahun 2024 :

1. Kecamatan Wonomulyo 2 Kebakaran
2. Kecamatan Limboro 3 Kebakaran
3. Kecamatan Matakali 4 Kebakaran
4. Kecamatan Binuang 5 Kebakaran
5. Kecamatan Polewali 19 Kebakaran

6. Kecamatan Mapilli 4 Kebakaran
7. Kecamatan Campalgian 8 Kebakaran
8. Kecamatan Balanipa 8 Kebakaran
9. Kecamatan Matangnga 1 Kebakaran
10. Kecamatan Tinambung 4 Kebakaran
11. Kecamatan Luyo 2 Kebakaran

Jenis Pelayanan Dasar sub urusan Kebakaran Daerah Kabupaten yaitu pelayanan Penyelamatan dan Rvakuasi Korban Kebakaran memuat :

- Layanan respon cepat (Respon time) penanggulangan kejadian kebakaran
- Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran
- Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan evakuasi
- Layanan Pemberdayaan masyarakat / relawan kebakaran
- Layanaan Pendataan , inspeksi dan invenstigasi pasca kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pemadam kebakaran Tugas Pokok Pemadam Kebakaran , selain Pemadaman UPTD Damkar juga melakukan Tugas Evakuasi dan Penyelamatan . Adapun Kegiatan Evakuasi dan Penyelamatan oleh Pemadam Kebakaran dari Bulan Januari sampai Desember 2024 sebanyak 34 Kegiatan berupa Kegiatan Evakuasi Sarang Tawon dan Hewan lainnya , Penyemprotan, Pencarian Orang Hilang, Bantuan Kegiatan Sosial, Evakuasi Korban bencana, Pengamanan, Pembersihan , Evakuasi Pohon Tumbang dan beberapa kegiatan Lainnya.



Tabel 3.13

Daftar Sarana dan Prasarana Pemadaman

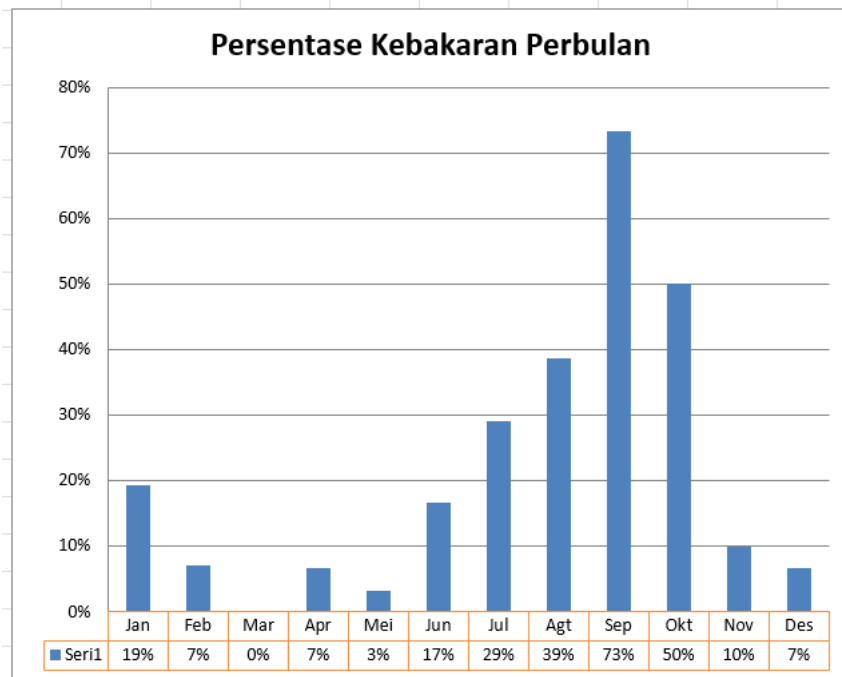
UPTD Pemadam Kebakaran

Kabupaten Polewali Mandar

NO	NAMA SARANA	JUMLAH	KET
1.	Armada Mobil Kebakaran	7 Unit	
2	APAR	11 Unit	
3	Alcon Pengisapan Air	3 Unit	
4	Alat Pemadam Portabel	6 Unit	
5	Selang Air	9 Unit	
6	Nozzel	8 Unit	
7	Baju anti Panas	6 Unit	
8	Sepatu Anti Panas	6 Unit	
9	Helm Anti Panas	6 Unit	
10	Baju anti api	5 Unit	
11	Handy Talky	9 Unit	
12	Set Tabung Oksigen	2 Unit	
13	Masker O2/Asap	4 buah	



Grafik 5
 Persentase Kebakaran Perbulan Tahun 2024



Data Penanggulangan Kebakaran Tahun 2024

Jenis Kerusakan	Jumlah	Persentase Pertahun
Rusak Ringan	49	13.42%
Rusak Sedang	14	3.84%
Rusak Berat	24	6.58%
Laporan Palsu	1	0.27%
Total	88	24.11%
Tertangani	Jumlah	Persentase Pertahun
Tertangani	69	18.90%
Tidak Tertangani	18	4.93%
Laporan Palsu	1	0.27%
Total	88	24.11%
Estimasi Waktu	Jumlah	Persentase Pertahun
0-15 Menit	38	10.41%
> 15 Menit	32	8.77%
Tidak Berangkat	17	4.66%
Laporan Palsu	1	0.27%
Total	88	24.11%
Jenis Kebakaran	Jumlah	Persentase Pertahun
Bangunan Dan Kendaraan	43	11.78%
Lahan	45	12.33%



Gambar 30
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kaebakaran Kab.Polewali Mandar Tahun 2022



Faktor Penghambat Pencapaian Target Kinerja Indikator 2 :

Faktor Penghambat pencapaian indikator 2 adalah :

1. *Kurangnya Fasilitas Armada Pemadam Kebakaran untuk Operasional dan Penempatan di Setiap Kecamatan*
2. *Tenaga Operasional Lapangan Pemadam Kebakaran masih kurang untuk memenuhi Kuota di Kecamatan*
3. *Tenaga PNS Pemadam Kebakaran Cuma 4 orang, PPPK 10 orang.*

Berdasarkan beberapa faktor Penghambat Target kinerja pada indicator 2 diatas maka UPTD pemadam Kebakaran Kab.Polewali Mandar melaksanakan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan sasaran Program Meningkatkan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran Capain Indikator Persentase kecamatan dengan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran memadai target 94%

Tabel 3.14

Program Kegiatan UPTD Pemadam kebakaran Tahun 2024

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2023 (%)		Ket
1	2	3	4		9 = (5+6+7+8)		10 = 9/4x100		11
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
III.	Program : PENCEGAHAN , PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran	100%	3.730.000.000	100%	3.729.435.226	100	100	
2.	Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan Kebakaran	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	1 Kali	3.730.000.000	1 Kali	3,729,435,226	100	100	
2.1	Sub Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	30 orang	3.730.000.000	30 Orang	3,729,435,226	100	100	
Predikat Kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

3.1.1.3. Capaian Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

- Indikator Kinerja 3 :**
- 1. Predikat SAKIP Perangkat Daerah**
 - 2. Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan asset perangkat daerah**
 - 3. Indeks kepuasan Pengguna pelayanan public perangkat daerah**

5.1.1.3.1 Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan beberapa faktor , Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi **Akuntabilitas Kinerja** Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Terdapat keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Penyusunan RENSTRA, RENJA , Perjanjian Kineja, SAKIP dan LAKIP

2. Pemantauan Pencapaian kinerja secara berkala

3. Memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun

Untuk Pengelolaan akuntabilitas Kinerja sangat perlu adanya upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dan Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala .

diharapkan disiplin kerja petugas Satpol PP akan meningkat, sehingga pelaksanaan pengukuran Kinerja berjalan dengan baik.

Peredikat SAKIP Satpol PP Tahun 2024 adalah BB dengan nilai 77,76

Tabel 3.15

	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Peredikat SAKIP Perangkat daerah	Predikat	B	BB	100



Untuk mencapai Indikator Kinerja diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Program Penujang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten /Kota Pada satu kegiatan Yaitu Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Pagu Rp.5.151.500,- realisasi 100% Perbandingan capaian Indikator tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.16

Capaian Indikator Perencanaan dan pelaporan Tahun 2022 dan 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen
2.	Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen

Faktor Penghambat Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis 3 Indikator 1 :

Adapun factor penghambat pencapaian Target Kinerja Sasaran strategis 3 Indikator 1 adalah :

1. Lambatnya pengumpulan data Pendukung dari Setiap Bidang tehnis pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam setiap penyusunan Laporan SAKIP , LPPD dan laporan Lainnya
2. Masih Kurangnya Perhatian Keterlibatan Unsur pimpinan pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyusunan dokumen Pendukung SAKIP

3.1.1.3.2 Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola pemerintahan perangkat daerah Indikator Kinerja Persentase Tertib Pengelolaan keuangan dana aset perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 mendapatkan opini WTP dengan Capaian 100% dibuktikan dengan tidak



adanya temuan terkait perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan selama satu tahun pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 3.17

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1 Persentase Tertib Pengelolaan keuangan dana aset perangkat daerah	Persen	100%	100%	100

Untuk mencapai Indikator Kinerja diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Satu Program Penujang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten /Kota Pada satu kegiatan Yaitu Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Jumlah Pagu Rp.6.985.692.963 - realisasi Rp. 6.985.692.963 atau 100%. Kemudian diurai pada 1 Sub kegiatan dengan capaian Indikator Kinerja sub Kegiatan .

Perbandingan capaian Indikator tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.18

capaian Indikator Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2023 dan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tujanganannya	95 Orang	96 Orang

Faktor Penghambat Pencapaian Taarget Kinerja Sasaran Strategis 3 Indikator 2:

1. Aplikasi Pengelolaan Keuangan masih dalam proses Pembelajaran sehingga Pengelolaan Keuangan melalui aplikasi sering terhambat
2. Aplikasi SIPD sering maintenance sehingga proses Pengelolaan Keuangan sering terhambat.

3.1.1.3.3. Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah

Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola pemerintahan perangkat daerah Indikator Kinerja Indeks Kepuasan pengguna pelayanan public perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 mendapatkan Predikat Baik dengan Capaian 100%.



Tabel 3.19

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Kepuasan pengguna pelayanan public perangkat daerah	Predikat	Baik	Baik	100

Untuk mencapai Indikator Kinerja diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Satu Program Penujang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten /Kota Pada lima kegiatan dapat dilihat pada table berikut ini :



Tabel 3.20
 Program Kegiatan Pelayanan Publik Tahun 2024

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2024 (%)		Ket
1	2	3	4		9 = (5+6+7+8)		10 = 9/4x100		11
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
1	Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah ; Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah ; Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	BB; WTP; Baik		BB; WTP; Baik		98		
3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS Perangkat daerah yang bernierja baik	100%	12.774.400	20	5.273.400	100	100	
3.1	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Panilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	12.774.400	2	5.273.400	100	100	
4.	Kegiatan : Administarsi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	100%	101.819.588	100	101.809.054	21	100	
4.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	10.215.108	29	10.214.400	100	100	
4.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	19.776.000	3	19.767.000	100	100	
4.5	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	4.028.180	7	4.027.900	100	100	
4.7	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59 Laporan	67.800.300	59	67.799.954	100	100	



6.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tertib ketatausahaan Kantor	100%	560.929.000	210	560.929.000	59	399	
6.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.929.000	12	8.929.000	100	100	
6.4	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	552.000.000	3	552.000.000	100	100	
7	Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Saran dan Prasaran kantor Kondisi Baik	100%	58.806.562	100	58.519.170	17	197	
7.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	58.806.562	12	58.519.170	25	82	
Predikat Kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	



Perbandingan capaian Indikator tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.21

Capaian Indikator Pelayanan Publik Tahun 2023 dan 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	3 Jenis	12 Bulan
2.	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	38 Jenis	35 Jenis
3.	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	3 Jenis	8 Jenis
4.	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan yang tersedia	55 Jenis	34 Unit
5.	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	Jumlah makan minum yang tersedia	3 Jenis	12 Bulan
6.	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	51 Laporan	80 Laporan
7.	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional secara rutin/berkala	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	7 Unit	7 Unit
8.	Meningkatnya kompetensi pegawai	Jumlah Pegawai yang menyelesaikan, pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	5 Orang	5 Orang
9.	Terpenuhinya kebutuhan Penagamanan Kantor	Jumlah tenaga Bantu Satpol PP	121 orang	121 orang

Indeks Kepuasan Masyarakat /Stakeholder Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan Predikat Baik:

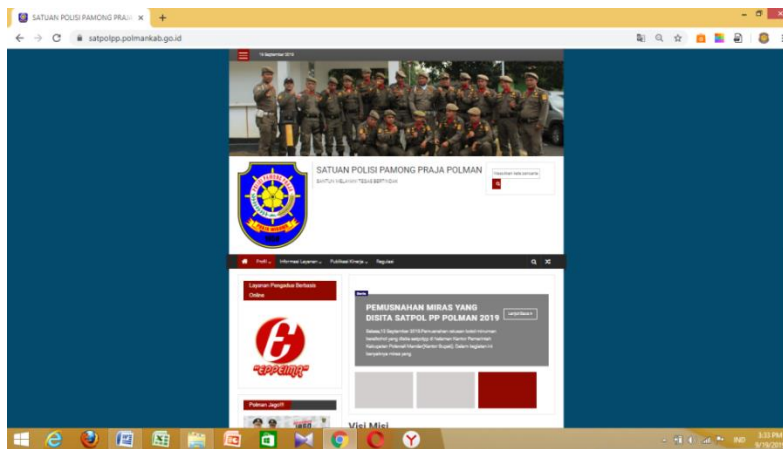
1. Satpol PP masuk 10 OPD Percotohan yang pada 8 Penilaian Reformasi Birokrasi



2. Dalam mewujudkan Pelayanan publik yang baik Satpol PP membuka Pengaduan Masyarakat melalui media sosial seperti website Satpol PP : satpolpp.polmankab.go.id maupun Via Whatapp .

Keterbukaan Informasi Publik sangat didukung dengan Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik dan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala salah Satu bukti Keterbukaan informasi publik pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah kegiatan yang telah dilaksanakan Satpol PP dan Damkar dipublikasi secara umum melalui beberapa media sosial seperti

- Website (satpolpp.polmankab.go.id)



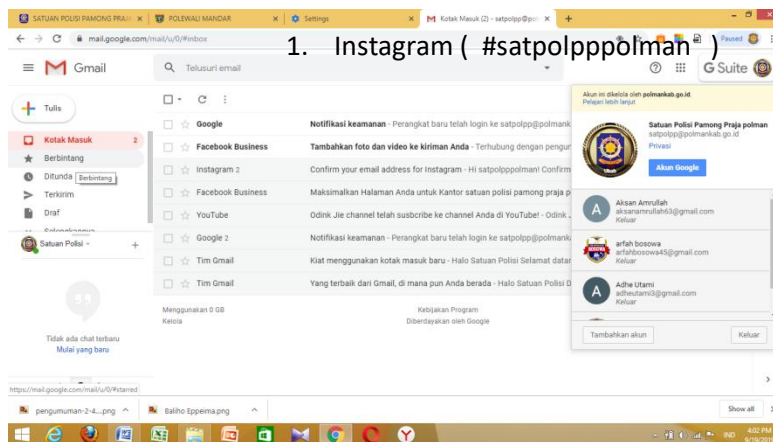
- Facebook (Satuan Polisi Pamong Praja Polman) .



➤ Youtube (Satuan Polisi Pamong Praja Polman)



➤ Email (satpolpp@polmankab.go.id)



➤ Instagram





3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan Satuan Polisi Pamong Praja menyajikan capaian realisasi anggaran sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024. Pada dasarnya Akutabilitas keuangan merupakan tolak ukur keberhasilan dalam mempertanggungjawabkan capaian kinerja terhadap pengelolaan dan pengendalian keuangan.

Pada Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar mempunyai pagu Anggaran Belanja sebesar Rp.11.577.269.325,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 3 program dan 10 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan . Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.11.568.888.953,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100 % dan capaian keuangan sebesar 99.93%, terjadi penurunan pagu dibanding tahun 2023 dengan pagu sebesar Rp.14.555.867.885.

Laporan Keuangan Satpol PP Tahun 2024

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> PEMERINTAHAN KAB. POLEWALI MANDAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024 </div>  </div>					
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$S = (4 / 3) * 100$	6
5	BELANJA DAERAH	11.577.269.325,00	11.568.888.953,00	99,93	14.221.848.878,00
5.1	BELANJA OPERASI	11.577.269.325,00	11.568.888.953,00	99,93	12.712.803.878,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.985.692.963,00	6.985.692.963,00	100,00	7.750.315.032,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.591.576.362,00	4.583.195.990,00	99,82	4.962.488.846,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	11.577.269.325,00	11.568.888.953,00	99,93	12.712.803.878,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	1.509.045.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	1.509.045.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	1.509.045.000,00
	JUMLAH BELANJA	11.577.269.325,00	11.568.888.953,00	99,93	14.221.848.878,00
	SURPLUS/DEFISIT	(11.577.269.325,00)	(11.568.888.953,00)	99,93	(14.221.848.878,00)

Kab. Polewali Mandar, 10 Maret 2025
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Arifin Halim, S.Sos, M.Si
 NIP. 196703192000121003





**PEMERINTAHAN KAB. POLEWALI MANDAR
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Neraca

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	4.625.946.243,00	4.625.805.843,00
1.1	ASET LANCAR	363.500,00	223.100,00
1.1.12	Persediaan	363.500,00	223.100,00
	JUMLAH ASET LANCAR	363.500,00	223.100,00
1.3	ASET TETAP	4.602.582.743,00	4.602.582.743,00
1.3.01	Tanah	430.920.000,00	430.920.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.805.830.600,00	5.805.830.600,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.595.700.000,00	1.595.700.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(3.229.867.857,00)	(3.229.867.857,00)
	JUMLAH ASET TETAP	4.602.582.743,00	4.602.582.743,00
1.5	ASET LAINNYA	23.000.000,00	23.000.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	23.000.000,00	23.000.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	23.000.000,00	23.000.000,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	4.625.946.243,00	4.625.805.843,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3	EKUITAS	4.625.946.243,00	4.625.805.843,00
3.1	EKUITAS	4.625.946.243,00	4.625.805.843,00
3.1.01	Ekuitas	(6.942.942.710,00)	(9.587.569.625,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	11.568.888.953,00	14.213.375.468,00
	JUMLAH EKUITAS	4.625.946.243,00	4.625.805.843,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.625.946.243,00	4.625.805.843,00



PEMERINTAHAN KAB. POLEWALI MANDAR
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 LAPORAN OPERASIONAL
 TAHUN ANGGARAN 2024
 1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	11.568.748.553,00	13.199.276.666,00	(1.630.528.113,00)	(12,35)
8.1	BEBAN OPERASI	11.568.748.553,00	12.712.710.778,00	(1.143.962.225,00)	(9,00)
8.1.01	Beban Pegawai	6.985.692.963,00	7.750.315.032,00	(764.622.069,00)	(9,87)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4.583.055.590,00	4.962.395.746,00	(379.340.156,00)	(7,64)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	11.568.748.553,00	12.712.710.778,00	(1.143.962.225,00)	(9,00)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	486.565.888,00	(486.565.888,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	486.565.888,00	(486.565.888,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN	11.568.748.553,00	13.199.276.666,00	(1.630.528.113,00)	(12,35)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(11.568.748.553,00)	(13.199.276.666,00)	1.630.528.113,00	(12,35)

Kab. Polewali Mandar, 10 Maret 2025
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Arifin Halim, S.Sos, M.Si
 NIP. 196703192000121003



PEMERINTAH KAB. POLEWALI MANDAR
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	4.625.805.843,00	3.611.707.041,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(11.568.748.553,00)	(13.199.276.666,00)
RK PPKD	11.568.888.953,00	14.213.375.468,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	4.625.946.243,00	4.625.805.843,00

Kab. Polewali Mandar, 10 Maret 2025
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Arifin Halim, S.Sos, M.Si
 NIP. 196703192000121003

Disetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



BAB IV PENUTUP

4.1. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar, pencapaian sasaran yang diinginkan tahun anggaran 2024 sesuai dengan indikator capaian kinerja secara keseluruhan mencapai 100 %. Secara kelembagaan Satpol PP pada tahun 2024 mendapatkan predikat **Wilayah Bebas Korupsi** (WBK), predikat ini dicapai karena tidak ada temuan kerugian negara selama 2 tahun berturut-turut pada Satuan Polisi Pamong Praja. Disamping itu, untuk hasil Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Satuan Polisi Pamong Praja menempati posisi urutan kedua diantara SKPD yang ada di Polewali Mandar.

Untuk mencapai Target Kinerja yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja perlu adanya komunikasi yang lebih insentif antar SKPD yang menjadi stakeholder dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah. Sangat dibutuhkan kerjasama dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.



4.2. SARAN

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar, dibutuhkan dana yang cukup terutama dalam peningkatan SDM anggota dalam penegakan perda.

Selanjutnya untuk optimalisasi pemberian pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan tugas lainnya, dibutuhkan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau laporan kinerja dan iktisar realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja anggaran 2024.

Polewali, 9 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



ARIFIN HALIM, S.Sos.MSi

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19670319 200012 1 003

